



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BERAU

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

TAHUN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2023 dapat disusun sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja OPD selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau.

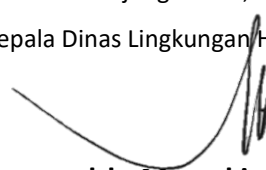
Diharapkan kinerja yang telah tercapai dapat terus dipertahankan dan yang masih belum memenuhi target dapat ditingkatkan melalui dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan termasuk penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan laporan ke depan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, serta kita semua selalu mendapat limpahan berkah dan hidayah Allah SWT. Aamiin Allahumma aamiin.

Tanjung Redeb, 19 Maret 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



drh. Mustakim Suharjana

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670327 199403 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKjIP ini disusun sebagai tindaklanjut dari menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Peraturan menteri tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Dan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat laporan kinerja pemerintah SKPD.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara umum berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dapat terlaksana dengan baik namun disadari masih banyak hal yang harus di tingkatkan seperti adminitrasi yang di luar kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Personil yang belum memadai,

Penerapan aturan yang kadang tidak sepaham antara pemangku kepentingan dengan OPD pelaksana.

Dengan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diharapkan LKjIP ini akan dapat memenuhi unsur – unsur yang dipersyaratkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur dan organisasi	2
D. Sumber Daya Aparatur	6
E. Aspek Strategis Organisasi	7
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	8
G. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Perencanaan Strategis	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
C. Perjanjian Kinerja	63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	66
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun	66
Tahun Sebelumnya	
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	67
C. Analisa Capaian Kinerja	68
D. Realisasi Anggaran	82
BAB IV PENUTUP	96
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah Pembangunan Masyarakat Kabupaten Berau seutuhnya yang mana hasilnya dinikmati langsung seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Berau.

Guna melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan hati nurani rakyat, maka dipandang perlu untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini guna meningkatkan keserasian antara pelaksanaan pembangunan dengan aspek lingkungan.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sangat diperlukan sehubungan dengan tugasnya sebagai koordinator Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dimana perubahan organisasi pada pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan Peraturan Bupati Berau No. 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran DLHK Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup:
 - a. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
 - b. Terjaganya kualitas air
 - c. Terjaganya kualitas udara
 - d. Meningkatnya tutupan lahan
 - e. Menurunnya Intensitas Emisi GRK
 - f. Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup
 - g. Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau

2. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan peran serta masyarakat dalam pengolahan/penangan sampah:

a. Tertanganinya pengolahan sampah

Dari tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Berau.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Berau No. 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

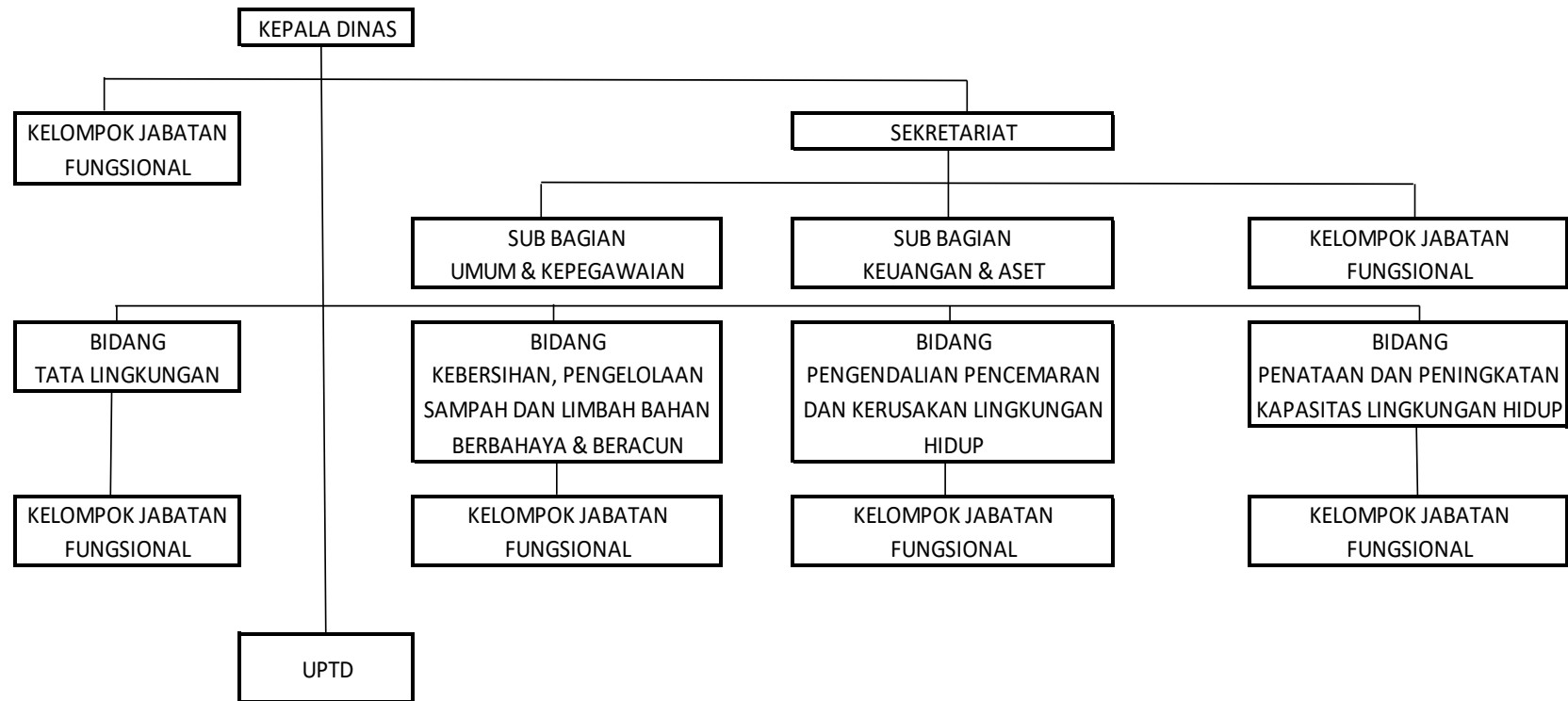
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

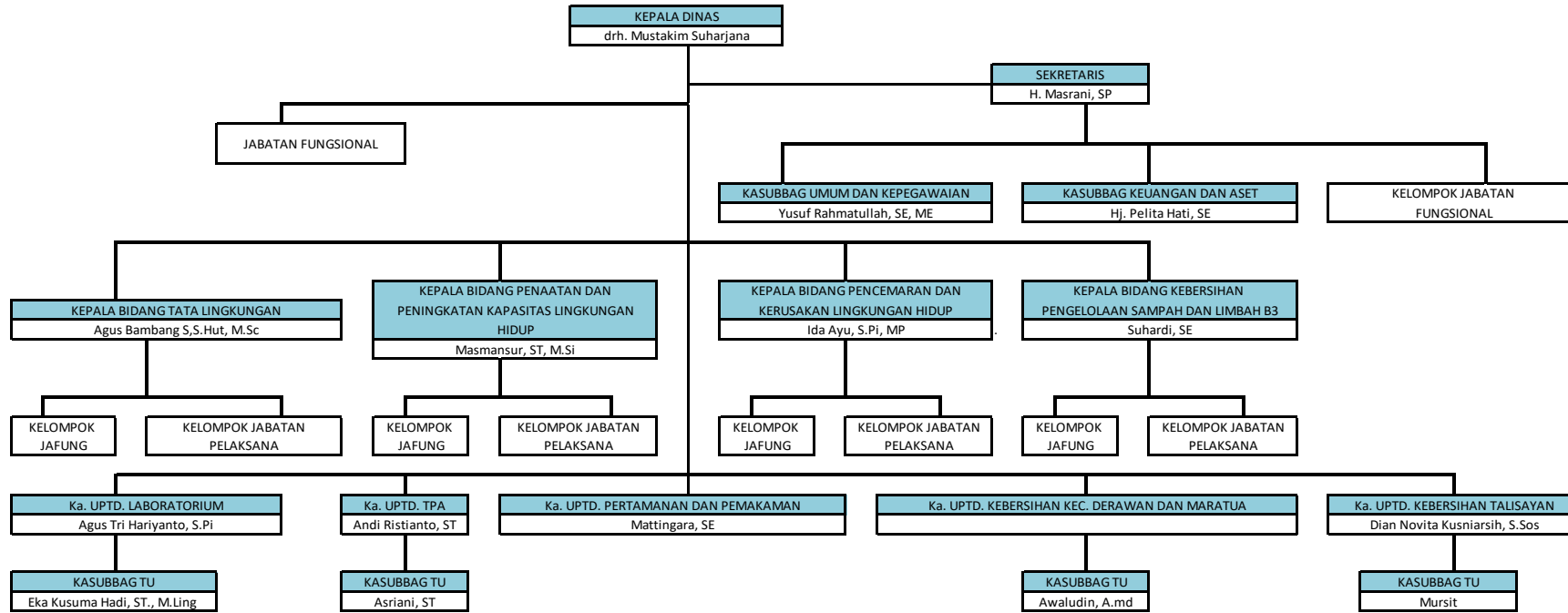
g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



Salah satu rencana kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pembacaan pidato kenegaraan saat pelantikan presiden periode 2019-2024 adalah melakukan pemangkasan atau penyetaraan beberapa jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsional. Ruang lingkup yang akan disetarakan adalah Jabatan Administrasi yang terdiri dari Jabatan Administrator (eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (eselon V). Berdasarkan Permenpan RB No. 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan penyetaraan pejabat struktural eselon IV ke pejabat fungsional (pengawas/pengendali dampak lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau.

Dari hasil penyetaraan, terbentuk struktur organisasi seperti pada halaman 7. Tujuan penyetaraan jabatan adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

D. Sumber Daya Aparatur

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil berjumlah 71 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 1 orang dimana 57 orang diantaranya adalah laki – laki dan 15 orang diantaranya perempuan. Berdasarkan golongan, ASN golongan IV berjumlah 8 (delapan) orang, golongan III 42 (empat puluh dua) orang, golongan II 15 (lima belas) orang, golongan I 6 (enam) orang dan golongan IX (bagi PPPK) 1 (satu) orang. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan:

Tabel. 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	IX (PPPK)	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	IX (PP PK)	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1						1				
Sekretaris	1		1						1				
Kepala Bidang Tata Lingkungan	1		1					1					
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup		1	1					1					
Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1		1					1					
Kepala Bidang Kebersihan, pengelolaan sampah, dan LB3	1		1						1				
JF Perencana Ahli Muda		1	1					1					
JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	6	1	7					7	1			
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	1		3					2	1			
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1						1		1				
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1			1				1					
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset		1		1					1				
Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	1			1					1				
Kepala Sub Bag TU UPT Laboratorium Lingkungan	1			1				1					
Kepala UPT TPAS	1			1					1				
Kepala Sub Bag TU UPT TPAS		1		1					1				
Kepala UPT Kebersihan Talisayan		1		1					1				
Kepala Sub Bag TU UPT Kebersihan Talisayan	1			1						1			
Kepala UPT Kebersihan Kepulauan Derawan dan Maratua	1			1					1				
Kepala Sub Bag TU UPT Kebersihan Pulau Derawan dan Maratua	1			1						1			
Kepala UPT Pertamanan dan Pemakaman	1			1					1				
Penelaah Teknis Kebijakan	3	6		9					9				
Pengolah Data Dan Informasi	2			2						2			
Pengadministrasi Perkantoran	10	1		7	4						10		1
Operator Layanan Operasional	19	1		3	14	3					10	5	5
Jlh PNS	52	20	8	42	18	3	1	6	29	6	20	5	6
Jlh Honor/PTT	255	171						1	49	1	210	63	102
Jlh PNS + Honor/PTT	307	191	8	42	18	3	1	7	78	7	230	68	108
Jumlah	307	191	8	42	18	3	1	7	78	7	230	68	108

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian DLHK Tahun 2023

Dari jumlah tenaga kerja yang ada sebagaimana yang tertera pada tabel di atas masih terdapat kekurangan tenaga kerja terutama pada bidang kebersihan ataupun UPTD

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sementara Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kuantitas dan kualitas para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

E. Aspek Strategis Organisasi

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakkan hukum yang efektif, transparansi, *responsive*, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel, dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementasi kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan Masyarakat.

Berbicara aspek strategis organisasi tidak terlepas dari peran serta dan dukungan ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas.

Untuk memberikan pengaruh yang baik bagi kinerja organisasi, penempatan pegawai dalam sebuah organisasi harus memperhatikan kebutuhan organisasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, merupakan perangkat daerah yang termasuk urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk maksud tersebut dan demi tujuan pemberian layanan yang optimal kepada Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di dukung dengan jumlah ASN sebanyak 72 orang dan

tenaga honorer/Pegawai Tidak Tetap sebanyak 426 orang (untuk petugas kebersihan, taman dan pemakaman). Dari jumlah pegawai yang ada, unsur pegawai yang harus ditambah dan dipenuhi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah unsur UPTD terutama di TPA Bunjanga dan TPA di kecamatan, serta petugas kebersihan di 4 (empat) kecamatan terdekat, yaitu Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaling, dan Gunung Tabur. Selain hal tersebut dukungan sarana dan prasarana juga menjadi masalah penting dalam upaya kelancaran operasional.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Dalam lima tahun kedepan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau beberapa diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup

Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Berau dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara Cuma-Cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan.

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam di lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

a. Pencemaran air semakin meningkat

Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktifitas tambang yang tidak ramah lingkungan. Aktifitas tambang batubara di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara tambang terbuka, walaupun ada beberapa yang menggunakan tambang bawah tanah (*underground mining*), sehingga akan berdampak terhadap perubahan bentang alam, sifat fisik, kimia, dan

biologis tanah, serta secara umum menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi. Dampak ini secara otomatis akan mengganggu ekosistem di atasnya, termasuk tata air (Subardja, 2007). Menurut Sayoga (2007) permasalahan lingkungan dalam aktivitas pertambangan batubara umumnya terkait dengan Air Asam Tambang (AAT) atau *Acid Mine Drainage* (AMD). Air tersebut terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan berair. Pestisida dan herbisida yang berlebih dari perkebunan kelapa sawit juga berpotensi mencemari sungai. Pengelolaan limbah yang kurang baik (membuang langsung ke sungai) mengakibatkan air tercemar, kotor, dan bau yang efeknya berbahaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Marganingrum dan Noviardi (2010) diketahui bahwa aktifitas tambang secara langsung maupun tak langsung mencemari air. Hasil analisis data yang diperoleh baik di lapangan maupun analisis laboratorium, baik dari sampel air maupun sampel tanah, menunjukkan bahwa keasaman air di sepanjang Sungai Lati lebih disebabkan oleh faktor lingkungan di sekitar penambangan batubara, daripada pencemaran dari limbah hasil pengolahan batubara. Hal ini ditunjukkan dengan pH sampel air dari outlet pengolahan sebesar 6,3 pada saat hujan dan 9,7 pada saat tidak hujan. Setelah mendapatkan masukan dari aliran sungai yang berasal dari disposal (A5), pH Sungai Lati kembali turun pada nilai 4. Oleh karena itu pengelolaan lahan bekas tambang perlu dilakukan secermat mungkin untuk menghindari kontak dengan udara dan air dari luar. Untuk meminimalisir polutan dari lokasi bekas tambang ataupun tanah disekitar penambangan batubara yang kaya akan mineral sulfide.

b. Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun

Pencemaran udara di Kabupaten Berau lebih disebabkan adanya pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat. Kualitas udara di Tanjung Redeb semakin menurun saat musim tanam tiba atau pembukaan lahan. Ini tidak lain akibat gangguan asap tebal yang mengurung langit akibat pembakaran lahan. Selain itu pencemaran udara juga disumbang dari asap kendaraan, pembakaran sampah di rumah tangga, asap 12ndustry. Hal ini tentu memerlukan pengaturan dan pemahaman kepada masyarakat serta perlu segera diambil langkah antisipasi atau mitigasi agar kedepannya kondisi udara jadi lebih baik.

c. Terus menurunnya kondisi hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian wilayah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem wilayah. Berdasarkan hasil telaah *World Agro Forestry Center dan The Nature Conservancy* (TNC) pada tahun 2009 saja atau selama periode 1990 sampai 2008 sekitar 39.000 hektar Hutan Berau mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi serta menghasilkan emisi karbon dioksida lebih dari 20 juta ton.

Meningkatnya kerusakan itu masih akan terus terjadi seiring tingginya ambisi perusahaan-perusahaan tambang yang ada untuk mencapai target produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Ancaman lain terhadap hutan Berau cukup tinggi jika pembangunan tidak dilakukan dengan bijaksana. Dengan dinamika pembangunan dan kegiatan penambangan yang semakin meningkat, maka kuantitas hutan mulai menurun. Tak hanya itu, komitmen perusahaan juga saat ini semakin menurun.

d. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang tinggi dan beragam di Indonesia. Di wilayah laut kabupaten ini terdapat terumbu karang yang luas dengan kondisi cukup baik. Keragaman terumbu karang Berau tertinggi kedua di Indonesia setelah Raja Ampat dan ke tiga di dunia. Hutan *mangrove* ditemukan di Delta Berau dan di sepanjang daerah pesisir. Sejumlah pulau-pulau kecil dan ekosistem padang lamun juga terdapat di daerah ini. Beberapa spesies yang dilindungi dapat ditemukan seperti penyu, paus, lumba lumba, duyung dan beberapa spesies lainnya. Perairan Berau dikenal sebagai wilayah yang memiliki habitat penyu hijau terbesar di Indonesia. Selain itu, potensi perikanan dan pariwisatanya masih baik. Namun demikian, di kawasan pesisir dan laut Berau juga terdapat berbagai permasalahan seperti kerusakan terumbu karang, penurunan populasi penyu, praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

Kerusakan daerah pesisir dan indikasi perkembangan Delta Sungai Mahakam dan Berau ke arah lepas pantai, erat sekali hubungannya dengan kegiatan di daratan Kalimantan timur terutama eksploitasi kayu secara liar (*illegal logging*) dan penebangan hutan *mangrove* di daerah pesisir yang makin lama tidak terkontrol. Selain itu, kendati masuk ke dalam salah satu tujuan wisata bawah laut kelas dunia, Kabupaten Berau masih harus berkuat dengan maraknya penggunaan bom dan racun ikan yang digunakan oleh nelayan setempat. Saat ini kerusakan terumbu karang yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau mencapai 60% dari luas total sebesar 480.000 hektare. Ini salah satunya diakibatkan oleh cara menangkap ikan dengan bahan kimia dan bom, selain karena faktor alam. "Kita perkirakan kerusakannya sudah 60%.

Memang tidak semua karena manusia, juga karena pemanasan global,” ujarnya. Sebanyak 12 pulau yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau, Kalimantan Timur dengan luasan 1,2 juta ha, diperkirakan sebanyak 40 persen atau 480.000 ha merupakan kawasan terumbu karang. Terumbu Karang Berau memiliki ribuan jenis terumbu karang dan puluhan ribu keanekaragaman hayati mendiami pulau itu, termasuk penyuh hijau.

Dengan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang besar beserta permasalahannya, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau perlu dikelola dengan baik dan tepat. Hal ini guna menjaga kelestarian dan berjalannya fungsi dari sumberdaya tersebut sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

e. Citra pertambangan yang merusak lingkungan

Aktivitas pertambangan di Berau yang mempunyai potensi merusak lingkungan jika tidak diatur, diawasi dan dikelola dengan bijak. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat dapat merusak lingkungan.

f. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*)

Kabupaten Berau termasuk daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kekayaan tersebut terletak baik di perairan maupun daratan. Keanekaragaman hayati flora dan fauna akuatik di Kabupaten Berau yang banyak dijumpai di perairan atau kawasan laut kepulauan Derawan

meliputi *mangrove*, lamun (*seagrass-meadows*), terumbu karang, ikan karang, Cetacean dan Manta Rays (kelompok paus dan lumba-lumba), penyu, ubur-ubur, biota lainnya (decapoda, alga, plankton, gastropoda, bentik foraminifera).

Keanekaragaman hayati flora dan fauna daratan di Kabupaten Berau banyak dijumpai di hutan, dan hasil survei fauna darat menunjukkan telah ditemukan sebanyak 42 jenis mamalia, 108 jenis burung, 6 jenis reptil, 9 jenis amphibi, 35 jenis ikan air tawar dan 14 jenis nyamuk. Fauna mamalia terdiri dari 4 jenis primata, 10 jenis rodentia, 3 jenis tupai, 3 jenis kucing, 4 jenis tikus, 9 jenis kelelawar dan 9 jenis mamalia lainnya. Bekantan dan orang utan termasuk mamalia dan merupakan endemik Pulau Kalimantan, sedangkan 13 jenis mamalia yang termasuk kategori dilindungi, yaitu beruang madu, garangan, kancil, kukang, kijang kuning, kucing hutan, landak, macan dahan, musang hitam, muncak, pelanduk napu, rusa, dan trenggiling. Fauna burung (avifauna) diantaranya adalah beo atau tlung (*Gracula religiosa*), elang bondol(*Hallaster indus*), burung raja udang (*Alcedo meninting*) yang merupakan avifauna kategori dilindungi. Sedangkan reptil kategori dilindungi adalah ular sawa (Phyton molurus), dan 3 jenis amphibi. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut akan hilang jika tidak dilindungi dan dipelihara dengan bijak.

G. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2023 sarana kerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah seperti pada tabel berikut:

**Tabel.2 Sarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Berau**

No.	Sarana Kerja	Jumlah
1.	Tanah	6 lokasi
2.	Gedung	7 unit
3.	Listrik	10 jaringan
4.	Air	4 jaringan
5.	Telepon/Wifi	4 line
6.	Area Parkir	4 area
7.	Ruang Rapat	2 ruang
8.	Ruang Arsip	1 ruang
9.	Koperasi	1 buah
10.	Taman Dalam	8 area
11.	Kendaraan roda 4	21 unit
12.	Kendaraan roda 2	18 unit
13.	Excavator	2 Unit
14.	Buldozzer	2 unit
15.	Well loder	1 unit
16.	Kendaraan roda 6	27 unit
17.	pH Meter	4 unit
18.	TDS meter	2 unit
19.	AAS	1 Unit
20.	AC	21 Unit
21.	Laptop/Note Book	43 unit
22.	Komputer (PC)	30 unit
23.	Handy Cam	1 unit
24.	Printer	49 unit
25.	Telephone (PABX)	1 unit
26.	TV	2 unit
27.	Sound System	3 Unit
28.	Meja kerja	70 Unit
29.	Sofa	4 set
30.	Alat-alat Laboratorium LH	1 paket

31.	Kursi dan meja Ruang Rapat	50 kursi dan 2 meja panjang
32.	Kendaraan Roda 3	10 unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2023

Dari tabel tersebut, sarana dan prasarana masih terdapat kekurangan terutama kendaraan operasional dilapangan, laptop/PC, printer dan bangunan kantor serta fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

A.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan konsisten dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Khususnya meningkatkan kualitas lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, serta target kinerja yang merupakan bagian dari penjabaran visi misi Kabupaten Berau.

Tabel 3. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		75,08	78,63	78,73	78,83	78,93	79,03	79,13
		Terjaganya Kualitas Air	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air		53,33	56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,79
		Terjaganya Kualitas Udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara		83,76	85,97	86,07	86,17	86,27	86,37	86,47
		Meningkatnya Tutupan Lahan	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun					2026
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Menurunnya Intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan		93,76	89,789	89,794	89,799	89,804	89,809	89,814
		Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	Ton eq	314.734,47	406,000	391.466	379.179	366.998	354.906	342.901
		Tertanganinya pengaduan Masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota	Kali pembinaan/pengawasan	20	20	20	20	20	20	20
		Tertanganinya pengaduan Masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	Pengaduan	7	7	7	7	7	7	7
		Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Persentase jumlah sampah yang tertangani		7	7	7	7	7	7	7
		Tertanganinya pengelolaan sampah		lokasi	4	4	4	4	4	4	4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun					2026
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan peran serta Masyarakat dalam pengolahan/penganganan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani			%	60,68	74	73	72	71	70	69

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi dan misi pembangunan yang

MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

Misi Ketiga: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang

tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan diharapkan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat kepastian. Peningkatan sarana dan prasarana publik diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

A.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup berarti ada upaya dari manusia untuk meningkatkan kualitas lingkungan atau ekosistem agar dapat membawa manfaat bagi makhluk hidup sekitarnya.

Kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi ketiga yaitu “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan”. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Berau mencapai tujuan dan sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Tabel 4. Strategi dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021-2026

Strategi	Sasaran
1. Pengendalian pencemaran air, udara, dan peningkatan tutupan lahan	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

2. Pengendalian pencemaran air	Terjaganya kualitas air
3. Pengendalian pencemaran udara	Terjaganya kualitas udara
4. Peningkatan Tutupan Lahan	Meningkatnya Tutupan Lahan
5. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan	Menurunnya Intensitas Emisi GRK
6. Mengoptimalkan pengawasan terhadap izin lingkungan	Tertibnya pengawasan izin lingkungan
7. Meningkatkan pembangunan taman dan ruang terbuka hijau	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup
8. Terpeliharanya ruang terbuka hijau	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau
9. a. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan/ penanganan sampah b. Penambahan tenaga lapangan dalam pengelolaan/ penanganan sampah	Tertanganinya pengelolaan sampah

gkah strategi yang dapat dilakukan dalam pencapaian Indikator Kinerja

Utama perangkat daerah diantaranya yaitu:

1. Menurunkan pencemaran air dari sumbernya

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dalam strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah dengan menurunkan pencemaran air dari sumbernya. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus memperhatikan kualitas air demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mensinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari

seungguhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu dan teknologi yang tidak digunakan dengan benar adalah terjadinya polusi (pencemaran). Polusi merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lain yang merugikan kedalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alami. Oleh karena itu transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi serta resiko bencana.

2. Pengendalian pencemaran udara

Masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Berau saat ini di dominasi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Pencemaran udara merupakan salah satu dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Berau. Laju urbanisasi yang tinggi, motorisasi dan industrialisasi telah menyebabkan permasalahan pencemaran udara yang menyebabkan pencemaran udara menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap kesehatan masyarakat, masyarakat miskin perkotaan, dan produktivitas nasional.

Semakin peliknya masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Berau menyebabkan kekhawatiran berbagai pihak akan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang. Udara banyak mengandung polutan,

penipisan lapisan ozon yang bisa mengganggu ekosistem bumi dan efek rumah kaca. Selain disebabkan oleh faktor alam, pencemaran udara lebih banyak disebabkan oleh manusia, misalnya dari kendaraan bermotor, kegiatan industri dan sebagainya. Selain dapat membahayakan lingkungan, pencemaran udara juga dapat membahayakan kesehatan manusia.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara yang lebih lanjut hendaknya dilakukan pengendalian pencemaran udara dengan menjaga kebersihan udara dan meminimalkan pencemaran udara, misalnya tidak memakai kendaraan bermotor yang sudah tua, tidak membuang gas yang berbahaya secara sembarangan terutama bagi kegiatan industri, dan lain sebagainya agar kebersihan udara Kabupaten Berau tetap terjaga.

3. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan)

Isu perubahan iklim yang semakin hari menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani, tidak terlepas dari dampaknya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia termasuk di Kabupaten Berau. Posisi geografis Kabupaten Berau yang terletak di daerah tropis dan kepulauan menjadikan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memandatkan bahwa dalam melakukan pemeliharaan lingkungan hidup diperlukan upaya diantaranya dengan cara pelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka menurunkan emisi GRK, Indonesia secara sukarela telah menetapkan target nasional dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% dari *business as usual* pada tahun 2020. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global.

Pemerintah Kabupaten Berau harus melakukan berbagai kegiatan nasional dan sektoral yang dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK seperti program berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan dan

kehutanan serta pemanfaatan teknologi energi bersih, pengurangan pemakaian BBM bersubsidi, khususnya dengan gas dan energi terbarukan, program konservasi energi dan lain-lain.

Sinergitas kebijakan lintas Kementerian dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dapat mendorong pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Untuk itu, masyarakat sudah harus bergerak ke dalam kegiatan konkrit yang berwawasan lingkungan.

4. Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan sampah. Kehadiran sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersial maupun industri tidak bisa dihindari bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu.

Penanganan sampah di Kabupaten Berau dilakukan dengan mengangkut sampah dari TPS dan dari rumah – rumah kemudian di buang ke TPA (tempat pembuangan Akhir).

Berdasarkan uraian tersebut pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Penimbunan di TPA). Sampah dikumpulkan dari sumbernya kemudian diangkut ke TPS dan terakhir ditimbun di TPA, tetapi reduksi sampah dengan mengolah sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk yang berguna perlu dipikirkan.

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan

prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh SKPD yang terlibat di dalamnya.

c. Program

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, pada Anggaran tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 73.489.317.609 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 9.892.394.303
2. Belanja Langsung = Rp. 63.596.923.306

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 9 (sembilan) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan, 45 (empat puluh lima) sub kegiatan Kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.5

Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup		Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air				Koordinasi dan Penyusunan
		Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ton eq			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha dan	Kali pembinaan/pengawasan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan peran serta masyarakat	<p>Tertanganinya pengaduan Masyarakat terhadap izin lingkungan hidup</p> <p>Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau</p> <p>Tertanganinya pengelolaan sampah</p>	<p>dampaknya di daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau</p> <p>Persentase jumlah sampah yang tertangani</p>	<p>pengaduan</p> <p>lokasi</p>		<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan</p>	<p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Pengadaan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan</p> <p>Pengadaan Mebel</p> <p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut</p>

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Perencanaan Lingkungan Hdup	Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/Kota Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigas dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabiltasi
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hdup Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
							Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
							Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Sementara Limbah B3
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
							Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
							Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
							Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
					Program Peningkatan Pendidikan,		Pengangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p> <p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan</p>	<p>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Sampah</p>	<p>Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p>

Tabel 6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	Rp	19,286,827,243
a.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp	233,680,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	141,620,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	10,000,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	82.060.000
b.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp	10,174,820,303
4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	9,892,394,303
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	282,426,000
c.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Rp	274,220,000
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	171.720.000
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	102.500.000
d.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp	817,584,800
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	17,215,000
9	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Rp	223,992,800
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	87,903,000

11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Rp	38,614,000
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	129,860,000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	320,000,000
e.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp	596,215,000
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	513,000,000
15	Pengadaan Mebel	Rp	83,215,000
f.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp	4,986,042,140
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,693,000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	320,392,800
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	4,659,95,516
g.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp	2,204,265,000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	1,325,500,000
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	67,000,000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	768,200,000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	42,665,000
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	1,127,500,000

h.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp	1,127,500,000
23	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp	1,127,500,000
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	4,791,564,100
i.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	1,079,250,100
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp	175,000,000
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	248,500,000
26	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	655,750,100
j.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	1,363,654,000
27	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp	1,220,404,000
28	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	143.250.000
k.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	2,348,660,000
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan unsur Pencemar	Rp	158,750,000
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp	2,064,910,000
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Rp	125,000,000
IV.	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	29,652,652,486
I.	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp	29,652,652,486
32	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Rp	700,000,000

33	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		28,102,954,486
34	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		849,698,000
V.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Rp	298,198,000
m.	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Rp	298,198,000
35	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	298,198,000
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	386,195,000
n.	<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	386,195,000
36	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp	154,320,000
37	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	231,875,000
VII.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	1,897,685,800
o.	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	1,897,685,800
38	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp	1,081,460,000
39	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp	231,620,000
40	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		584,605,800
VIII.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	176,900,000
p.	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah</i>	Rp	176,900,000

	Kabupaten/Kota		
41	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp	176,900,000
IX.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	15,880,794,980
q.	Pengelolaan Sampah	Rp	15,880,794,980
42	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp	565,906,800
43	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	7,257,268,580
44	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp	575,614,800
45	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	7,482,004,800
	Jumlah Belanja	Rp	73,498,317,609

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2023, dengan Anggaran Rp. 73.498.317.609 terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan

dengan baik. Untuk tahun 2023 ini ada penambahan anggaran dana DBH (Dana Reboisasi) sebesar Rp. 25.779.725.790 yang masuk dalam batang tubuh anggaran DLHK, yang terbagi dalam 5 (lima) sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.064.910.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.722.046.782, Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp 900.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 757.507.748,-, Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.394.523.990 dan realisasi 20.601.612.690 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp 989.686.000 dan realisasi sebesar Rp 902.870.000 serta Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (ADIWIYATA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 430.605.800 dan realisasi anggaran sebesar Rp 407.357.550.

Selain DBHDR dialokasikan juga program FCPF-CF (Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund yang merupakan bagian dari inisiatif yang dimiliki oleh Bank Dunia sebagai bentuk apresiasi/penghargaan terhadap negara-negara berkembang yang telah berhasil melakukan upaya-upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dimana di DLHK dialokasikan dana sebesar Rp 700.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 670.006.922,-

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, penetapan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 01 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah :

1. Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca

Indikator kinerja utama OPD berdasarkan Rencana Strategis DLHK tahun 2021-2026

adalah:

1. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
5. Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan
6. Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
7. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota
8. Terpeliharanya ruang terbuka hijau
9. Presentasi jumlah sampah yang tertangani

Tabel. 7. Sasaran Stragis, Indikator Sasaran, Penjelasan (Formulasi Penghitungan), Sumber Data dan Penanggung Jawab

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$I_{KH} = (I_{KA} \times 0,376) + (I_{KU} \times 0,405) + (I_{TL} \times 0,219)$	Permen LHK No. 027 Tahun 2021	Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Terjaganya Kualitas Air	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Nilai IKA diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian	Permen LHK No. 027 Tahun 2021	Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	Terjaganya Kualitas Udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	persentase setiap status mutu dengan bobotnya IKU = $100 - [\frac{50}{0,9} (I_{eu} - 0,1)]$	Permen LHK No. 027 Tahun 2021	Laboratorium Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Tutupan Lahan	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = $100 - [(84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3}]$	Permen LHK No. 027 Tahun 2021	
	Menurunnya Intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	Dari aplikasi Aksara		
	Tertibnya Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan terkait penataan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	<p>Tertanganinya pengaduan Masyarakat terhadap izin lingkungan hidup</p> <p>Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau</p> <p>Tertanganinya pengelolaan sampah</p>	<p>Daerah Kabupaten/ Kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau</p> <p>Persentase jumlah sampah yang tertangani</p>			

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi ketiga yaitu “Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, dan berwawasan lingkungan”.

Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Terjaganya Kualitas Air
- Terjaganya Kualitas Udara
- Meningkatnya Tutupan Lahan
- Menurunnya Intensitas Emisi GRK
- Tertibnya pengawasan terhadap izin Lingkungan Hidup
- Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap Izin Lingkungan Hidup
- Meningkatnya Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau
- Tertanganinya Pengelolaan Sampah

Tabel 8. VISI: MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRASFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	Kondisi awal	TARGET TAHUNAN						Target Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi III : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan										
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
1	Meningkatkan indeks indeks kualitas lingkungan hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup		78,63	78,73	78,83	78,93	79,03	79,13	79,13
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran indeks kualitas air		56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,69	56,69
3	Terjaganya Kualitas Udara	Hasil pengukuran indeks kualitas udara		85,97	86,07	86,17	86,27	86,37	86,47	86,47
4	Meningkatnya Tutupan Lahan	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		89,789	89,794	89,799	89,804	89,809	89,814	89,814
5	Menurunnya Intensitas Emisi GRK	Jumlah Emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan		406.000 ton Co2 eq	391.466 ton Co2 eq	379.179 ton Co2 eq	366.998 ton Co2 eq	354.906 ton Co2 eq		342.901 ton Co2 eq

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	Kondisi awal	TARGET TAHUNAN						Target Akhir		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Misi III : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan											
										342.901 ton Co2 eq	
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20 kali Pembina an/ Pengawas an	20 kali Pembina an/ Pengawas an	20 kali Pembina an/ Pengawas an	20 kali Pembina an/ Pengawas an	20 kali Pembina an/ Pengawasan	20 kali Pembina an/ Pengawas an	20 kali Pembina an/ Pengawas an	20 kali Pembina an/ Pengawasan
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah		7 pengadu an	7 pengadu an	7 pengadu an	7 pengadu an	7 pengadu an	7 pengadu an	7 pengadu an	7 pengadu an

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	Kondisi awal	TARGET TAHUNAN						Target Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi III : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan										
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau		4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi
2	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan peran serta masyarakat dalam pengolahan/penanganan sampah									
	Tertanganinya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani		74%	73%	72%	71%	70%	69%	69%

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja DLHK Kabupaten Berau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DLHK tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja (RENJA) DLHK Kabupaten Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Berau selama tahun lalu dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa Dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Rencana kinerja tahun 2023

Kode					Uraian program/ sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja				Pagu indikator (2023)	
							Progran/outcome		Sub Kegiatan/output		Sub Kegiatan	Program
							Uraian	target	Uraian	target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							DLHK
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							38,295,000,000
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan	90%				
2	11	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Kab. Berau			Tersusunnya dokumen program dan kegiatan lingkungan hidup	1 Dokumen	85,000,000	

2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Berau			Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD	1 Dokumen	10,000,000	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Berau			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	81 Orang	9,505,217,708	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau			Tersedianya honor pengelola keuangan	12 Orang	104,494,950	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Jumlah orang yang mengikuti Bimtek			
2	11	01	2.05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Fungsi				Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	20 orang	200.000.000	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Berau			Tersedianya peralatan listrik dan elektronika	12 Bulan	10,409,000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	120,742,230	

2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Berau			Tersedianya makan dan minum rapat	12 Bulan	43,550,850	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Berau			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	10 jenis	14,495,880	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Berau			Tersedianya surat kabar dan majalah	5 exemplar	5,250,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau			Tersedianya belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah	1 Tahun	210,000,000	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional di Lapangan				Terlaksananya operasional di lapangan			
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel							
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau			Jumlah surat	12 Bulan	5,242,000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau			Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	4 jenis	262,000,000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau			Terbayarnya honor pegawai tidak tetap	118 orang	3,920,120,408	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau			Tersedianya biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas	30 jenis	1,469,913,480	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	30 jenis	15,750,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Berau			Tersedianya jasa perbaikan gedung kantor	12 Bulan	52,497,000	

2	11	01	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau			Tersedianya jasa / peralatan kebersihan	5 Buah	6,297,900	
2	11				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	90%		
2	11	02	2		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota							
2	11	02	2.01	0	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				Terlaksananya Penyusunan KLHS RDTR	1 dokumen	315,000,000	
2	11	02	2.02	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Kab. Berau			Terlaksananya penyusunan KLHS rencana detail tata ruang	1 Dokumen	350,000,000	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	90%		

					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan, Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	Kab. Berau			Jumlah titik/objek yang dipantau	13 Kecamatan	134,000,000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Berau			Tersedianya Laporan Pemantauan dan Pelaporan Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK	379.179	145,000,000	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Kab. Berau			Jumlah Data Uji	50 dokumen	200,000,000	

2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Kab. Berau			Jumlah titik objek monitoring	3 sungai	130,000,000	
2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Berau			Jumlah areal/titik yang dipantau	13 Kecamatan	100,000,000	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Berau			Jumlah areal/titik yang dipantau	13 Kecamatan	100,000,000	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Berau			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	13 kali		
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kab. Berau			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	13 kali	140,000,000	
2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab. Berau			Jumlah koordinas dan sinkronisasi yang dilakukan	13 kali		
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Berau			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	13 Kali	150,000,000	

									yang dilakukan			
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kab. Berau			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	13 Kali	100,000,000	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	90%				
					Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							
2	11	04	2.04	01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perkotaan di Kec. Tanjung Redeb, Kec. Sambaliung, Kec. Gunung Tabur dan Kec. Teluk Bayur			Terpeliharanya RTH Publik di perkotaan	4 lokasi	4,598,000,000	

2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Perkotaan di Kec. Tanjung Redeb, Kec. Sambaliung, Kec. Gunung Tabur dan Kec. Teluk Bayur			Bertambahnya RTH Publik yang dibangun dan RTH Publik yang direnovasi	4 lokasi	535,500,000	
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	90%				
					Penyimpanan Sementara Limbah B3		Tersedianya data penyimpanan sementara limbah B3					

2	11	05	2. 0 1	0 2	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Berau			Tertibnya Perizinan Limbah B3	20 dokumen	78,000,000	
---	----	----	--------------	--------	--	------------	--	--	-------------------------------	------------	------------	--

					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten /Kota	90%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

					Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota							
2	11	06	2.01	01	Fasilitas pemenuhan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau ijin PPLH	Kab. Berau			Jumlah rekomendasi yang ditertibkan	100 Dokumen	84,000,000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup, ijin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Berau			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	20 Pelaku Usaha	105,000,000	
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINHKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan Kepedulian Masyarakat terhadap	90%				

							Lingku n Hidup					
2	11	06	2. 0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Berau	Jumlah Penyuluha n yang diberikan kepada Lembaga Kemasyara katan					
2	11	08	2. 0 1	0	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Kab. Berau			Kepedulian masyarakat terhadap kampung iklim	1 Kampung	67,990,550	
2	11	08	2. 0 1	0	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Kab. Berau			Terlaksananya kegiatan peduli lingkungan hidup	1 Event	63,629,470	
2	11	08	2. 0 1	0	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kab. Berau			Jumlah sekolah mendapatkan adiwiyata	4 Sekolah	72,999,650	

					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Terselesainya Jumlah Pengaduan Masyarakat	90%				
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Terselesainya jumlah pengaduan masyarakat					
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Berau			Jumlah pengaduan Masyarakat yang ditangani	7 Pengaduan	78,727,425	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Terkelolanya Sampah	90%				
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah		Terkelolanya Sampah					

2	11	11	2.01	0	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota	Kab. Berau			Tersedianya dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah			
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	kab. Berau			Meningkatnya Persentase Pengurangan Sampah melalui 3 R	27%	220,000,000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Berau			Jumlah sampah yang terangkut	4 Kecamatan	7,000,000,000	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Berau			Terlaksananya lomba kebersihan antar RT dan terlaksananya penilaian Adipura	4 Kecamatan	300,000,000	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Berau			Tersedianya prasarana dan sarana operasional pengelolaan	10 jenis	1,165,000,000	

									persampahan			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemilik instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atasan kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Berau, perjanjian kinerja kepala DLHK di tanda tangani oleh Bupati Berau, eselon III ditandatangani oleh eselon II, eselon IV ditandatangani oleh eselon III, Pejabat Fungsional di tandatangani eselon II dan untuk pelaksana ditandatangani oleh eselon IV, eselon III dan Sekretaris.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari, 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

()

()

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eselon

NO	Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1			
2			
3			

Program Kegiatan

Anggaran

1.

Rp. -

2.

Rp. -

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas/Badan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 35.302.623.126. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 73.498.317.609 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.892.394.303 dan Belanja Langsung Rp 63.605.923.306 dengan realisasi belanja tidak langsung Rp 9.300.444.260 (91,35%), belanja langsung sebesar Rp 58.887.278.220 (92,59%).

2. Target Belanja Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tabel 9. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	9.892.394.303	9.300.444.260	91,35
2	Belanja Langsung	63.605.923.306	58.887.278.220	92,59
Jumlah		73.498.317.609	68.187.722.480	92,77

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas/Badan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4.791.564.100	4.039.731.759	84,30
2	Terjaganya Kualitas Air	1.697.404.000	1.373.831.343	80,93
	Terjaganya Kualitas Udara	1.697.404.000	1.373.831.343	80,93

4	Meningkatnya Tutupan Lahan	2.189.910.000	1.826.023.032	83,38
5	Menurunnya intensitas emisi GRK	248.500.000	226.725.539	91,23
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	386.195.000	357.425.627	92,55
7	Tertanganinya pengaduan Masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	176.900.000	147.441.065	83,34
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan Ruang Terbuka Hijau	28.952.652.486	27.962.062.186	96,57
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	15.880.794.980	14.912.841.262	93,90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Tabel 10. Komponen Nilai hasil Reviu Inspektorat Tahun 2019

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,66
2	Pengukuran Kinerja	30%	16,88
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,12
4	Evaluasi Kinerja	25%	20,6
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	74,26
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		74,26

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 11. Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Berau dan Tindak Lanjut/ Rencana Aksi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
1	Capaian target kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward apabila telah mencapai target dan punishment apabila tidak mencapai target	Memberikan reward kepada pegawai berprestasi Memberikan punishment	Sudah Belum
2	Informasi mengenai analisa pencapaian IKU agar dapat disajikan ke dalam laporan kinerja	Menganalisa pencapaian IKU dalam laporan	Sudah
3	Melakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam renstra dan menyelaraskan dengan RPJMD	Menyusun IKU pada renstra selaras dengan RPJMD	Sudah

--	--	--	--

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian indikator Kinerja Utama tahun 2023 merupakan penilaian beberapa indikator kinerja sasaran utama yang telah ditetapkan dalam program kegiatan dan menjadi IKU OPD yaitu :

Tabel 12. Sasaran, Indikator Kinerja, Target Tahunan dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2023	Realisasi	Target	Realisasi	%
	1	2	4	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup		78,83	75,08	Triwulan IV	75,08	95,24
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air		56,49	53,33	Triwulan IV	53,33	94,40
3	Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara		86,17	85,17	Triwulan IV	85,17	98,83
4	Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		89,799	93,76	Triwulan IV	93,76	104,41
5	Menurunnya intensitas emisi emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	Ton eq	379.179	314.734,47	Triwulan IV	314.734,47	83
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	Kali pembinaan/ pengawasa n	20 kali pembinaan/ pengawasa n	20 kali pembinaan/ pengawasa n	Triwulan IV	20 kali pembinaan/ pengawasa n	100

		diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Pengaduan	7 pengaduan	7 Pengaduan	Triwulan IV	7 Pengaduan	100
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	lokasi	4 lokasi	4 lokasi	Triwulan IV	4 lokasi	100
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	Presentase jumlah sampah yang tertangani	%	72%	59,39%	Triwulan IV	59,39%	82,48

Selain pengukuran pencapaian indikator Kinerja Utama tahun 2023 sebagaimana table di atas, disajikan pula pengukuran capaian kinerja untuk realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana table berikut:

C. Analisa Capaian Kinerja

Dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2023, dapat dianalisa capaian sebagai berikut:

Tabel 13. Sasaran, Indikator Kinerja, target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup	78,83	75,08
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,49	53,33
3	Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara	86,17	85,17
4	Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,799	93,76
5	Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	379.179	314.734,47
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 kali pembinaan/ pengawasan	20 kali pembinaan/ pengawasan
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	7 pengaduan	7 Pengaduan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	4 lokasi	4 lokasi
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	Presentase jumlah sampah yang tertangani	72%	59,39%

Melihat capaian kinerja pada tabel diatas, untuk hasil perhitungan IKLH yaitu 75,08, nilai termasuk dalam kategori baik walaupun belum memenuhi target senilai 78,73. Hal ini dipengaruhi oleh hasil pengukuran indeks kualitas air dan udara yang belum memenuhi target yaitu 53,33 dan 85,17 dari 56,49 dan 86,17. Untuk nilai indeks tutupan lahan pada tahun 2023 melebihi dari target yang ditentukan yaitu 93,76 dari 89,799. Tercapainya target kinerja tersebut dapat dicapai melalui upaya mitigasi disebabkan baiknya mitigasi dalam hal upaya penutupan lahan. Dari tabel tersebut terlihat emisi yang dapat diturunkan senilai 314.734,47 kurang dari nilai yang ditargetkan yaitu 379.179. Masih adanya emisi karbon disebabkan pada tahun 2023 terjadi fenomena alam el nino yang menyebabkan kebakaran di beberapa titik, sehingga stock karbon dan gas rumah kaca yang terdapat pada areal tersebut terlepas ke atmosfer, selain itu masih minimnya data kegiatan mitigasi yang dilaporkan OPD terkait sampai laporan dibuat membuat data realisasi penurunan emisi gas rumah kaca tidak mencapai target. Demikian pula untuk indikator kinerja Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin, tahun 2022 target dapat terpenuhi dengan kuantitas pembinaan

dan pengawasan sebanyak 20 kali pembinaan/pengawasan. Begitu pula dengan indikator kinerja Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota, target dapat tercapai sebanyak 7 pengaduan dapat tertangani. Untuk indikator terpeliharanya ruang terbuka hijau, target dapat terpenuhi di 4 lokasi yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Sambaliung. Presentase jumlah sampah yang tertangani sudah memenuhi target yaitu 59,39% dari 72%. Secara umum target kinerja dapat tercapai dengan baik dimana menunjukkan kinerja DLHK juga baik.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 14. Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Realisasi, Persentase Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup		78,83	75,08	95,24
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air		56,49	53,33	94,4
3	Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara		86,17	85,17	98,83
4	Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		89,799	93,76	104,41
5	Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	Ton eq	379.179	314.734,47	83
6	Tertibnya pengawasan	Pembinaan dan pengawasan terkait	Kali pembinaan/p	20 kali pembinaa	20 kali	100

	terhadap izin lingkungan hidup	penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pengawasan	n/ pengawas an	pembinaan/ pengawasa n	
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Pengaduan	7 pengadua n	7 Pengaduan	100
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	Lokasi	4 lokasi	4 lokasi	100
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	Presentase jumlah sampah yang tertangani	%	72%	59,39%	82,48

Membandingkan antara target kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja,

untuk beberapa sasaran, capaian kinerjanya kurang dari target yang telah ditetapkan seperti meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terjaganya kualitas air, terjaganya kualitas udara, menurunnya intensitas emisi GRK, dan tertanganinya pengelolaan sampah. Untuk capaian kinerja dimana hasilnya melebihi dari target yang ditetapkan adalah meningkatnya tutupan lahan. Untuk capaian kinerja sasaran tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup, tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup, meningkatnya pengelolaan taman dan

ruang terbuka hijau sama dengan target yang ditetapkan. Namun demikian realisasi kinerja tahun 2023 umumnya masih dalam kategori baik walaupun capaian kinerja beberapa indikator belum memenuhi sebagaimana target yang diharapkan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Berdasarkan Renstra (2021-2026), ada 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang menjadi sasaran OPD dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2023 umumnya berbeda dengan capaian tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa indikator yang sama seperti tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup, tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup, meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau, namun demikian secara umum target capaian kinerja terealisasi dengan kategori baik.

Tabel 15. Indikator Kinerja dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup		74,75	75,08	4,47
2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air		53,48	53,33	0,28
3	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara		83,76	85,17	1,65
4	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		94,64	93,76	0,93
5	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	Ton eq	440.918	314.734,47	40,09
6	Pembinaan dan	Kali pembinaan/ pengawasan	20 kali	20 kali	100

	pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		pembinaan/ Pengawasan	pembinaan/ pengawasan	
7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Pengaduan	7 pengaduan	7 Pengaduan	100
8	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	Lokasi	4 lokasi	4 lokasi	100
9	Presentase jumlah sampah yang tertangani	%	46,98%	59,39%	126,41

Melihat hasil capaian kinerja tahun 2022 dan 2023, ada 3 indikator kinerja utama yang capaiannya sesuai target yaitu pertama, pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kedua pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota, dan IKU ketiga yaitu terpeliharanya ruang terbuka hijau. Realisasi IKU untuk hasil pengukuran indeks kualitas air dan udara ditahun 2022 dan 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali hasil pengukuran indeks tutupan lahan yang capaiannya melebihi target. Namun demikian hasil perhitungan IKLH masih dalam kategori baik. Untuk jumlah emisi yang diturunkan pada tahun 2022 nilainya 440.918 ton CO₂eq, lebih besar dari tahun 2023, dengan nilai 314.734,47 ton CO₂eq. Untuk capaian kinerja persentase jumlah sampah yang tertangani tahun 2022, terpenuhi target secara

signifikan yaitu 46,98% dari target sebesar 73%. Hal ini sama dengan capaian kinerja tahun 2023 dimana terealisasi 59,39% dari target sebesar 72%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran kinerja RPJMD 2021-2026 untuk DLHK adalah meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang mana dijabarkan lagi dalam RENSTRA 2021-2026 DLHK menjadi 9 (Sembilan) sasaran dan indikator kinerja. Dalam RPJMD terkandung 1 (satu) sasaran program terdiri dari 3(tiga) indikator kinerja, yang mana indikator kinerja tersebut juga terkandung di RENSTRA 2021-2026.

Setelah terlaksananya program dan kegiatan, dapat dilihat bahwa untuk indikator hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air dan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara nilainya dibawah target, tetapi masih dalam kategori sedang dan baik. Sedangkan untuk indikator indeks kualitas tutupan lahan nilainya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 93,76. Memperhatikan hal tersebut bahwa secara umum kinerja OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam kategori baik sehingga dapat ditingkatkan dan dipertahankan untuk pencapaian tahun selanjutnya.

Tabel 16. Indikator Kinerja, realisasi 2023 dan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2023)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup		79,13	75,08	94
2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air		56,79	53,33	93,90
3	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara		86,47	85,17	98,49

4	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		89,814	93,76	104,39
5	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	Ton eq	342.901	314.734,47	91,78
6	Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kali pembinaan/ pengawasan	20	20 kali pembinaan/ pengawasan	100
7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Pengaduan	7	7 Pengaduan	100
8	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	Lokasi	4	4 lokasi	100
9	Presentase jumlah sampah yang tertangani	%	69	59,39%	86,07

Melihat dari table di atas, persentase tingkat kemajuan rata-rata di atas 90%, bahkan ada yang mencapai lebih dari 100% seperti Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 104,39%. Namun demikian melihat dari angka persentase kemajuan, nilai terendah terdapat pada persentase jumlah sampah yang ditangani, walaupun secara capaian target kinerja termasuk tinggi karena target setiap tahun adalah menurun.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Memperhatikan uraian dan tabel di atas, hasil pengukuran indeks kualitas air dan hasil pengukuran indeks kualitas udara tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian 53,33 (IKA) dan 85,17 (IKU) dari target 56,49 (IKA) dan 86,17 (IKU). Hal ini berpengaruh terhadap nilai IKLH, sehingga target indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup tidak tercapai. Tidak tercapainya indeks kualitas air dikarenakan tingginya curah hujan, tidak adanya serapan untuk air hujan, alih fungsi lahan sehingga menyebabkan parameter pada perhitungan indeks kualitas air menjadi meningkat seperti kekeruhan, fecal coli, BOD, dan COD. Sedangkan tidak tercapainya target indeks kualitas udara disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya kegiatan yang menimbulkan dampak emisi seperti perbaikan infrastruktur, dan kurangnya lahan untuk penghijauan. Dengan tidak tercapainya IKA dan IKU, maka hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup juga tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dari capaian indikator kinerja berdasarkan RPJMD ataupun renstra, nilai indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 93,76 dari 89,799, hal ini disebabkan adanya penambahan tutupan lahan seluas 20 Ha yang dilaksanakan di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk di areal penggunaan lain (APL) oleh KPH Berau Pantai. Walaupun capaian Indeks Tutupan Lahan melebihi target, namun masih ada emisi gas karbon yang perlu diturunkan, hal ini disebabkan karena terjadinya fenomena alam elnino sehingga mengakibatkan kebakaran di beberapa titik, peningkatan jumlah kendaraan yang juga menjadi penyumbang emisi gas karbon.

Beberapa indikator kinerja mencapai target 100% sebagaimana yang telah ditetapkan seperti Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota.

Selain masalah tersebut di atas beberapa hal yang juga menjadi kendala diantaranya yaitu, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, adanya laboratorium lingkungan hidup yang belum terakreditasi. Untuk keberhasilan yang dicapai disebabkan adanya komitmen yang baik semua unsur OPD untuk menyelesaikan pekerjaan, serta kerjasama yang baik antar unsur OPD di DLHK.

5. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 17. Sasaran Strategis, Persentase Capaian Kinerja, Persentase Penyerapan

Anggaran dan Tingkat Efisiensi

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	95,24	84,30	10,94
	Terjaganya Kualitas Air	94,4	80,93	13,47
	Terjaganya Kualitas Udara	98,83	80,93	17,9
	Meningkatnya Tutupan Lahan	104,41	83,38	21,03
	Menurunnya intensitas emisi GRK	83	91,23	-8,23
	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	100	92,55	7,45
	Tertanganinya pengaduan Masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	100	83,34	16,66
	Meningkatnya pengelolaan taman dan Ruang Terbuka Hijau	100	96,57	3,43
	Tertanganinya pengelolaan sampah	82,48	93,90	-11,42

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 75 orang, dimana 59 orang diantaranya adalah laki – laki dan 16 orang diantaranya perempuan. Sumber daya manusia untuk dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan masih terbatas terutama untuk tenaga ASN, personil UPTD, sehingga pelaksanaan tugas dioptimalkan dengan ketersediaan tenaga yang ada termasuk non ASN (PTT/tenaga swakelola).

Berdasarkan tabel di atas tingkat efisiensi memiliki range angka dari 11,42 sampai 21,03, dimana semua tingkat efisiensi dipengaruhi dari berbagai faktor, diantaranya sumberdaya manusia, ketersediaan data, alokasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis DLHK.

6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, maka ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 yaitu 9 (sembilan) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel realisasi program/kegiatan Anggaran belanja langsung dan Tidak Langsung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	Rp	19,286,827,243	17.433.155.779	92,00
a.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp	233,680,000	200.658.236	85,90
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	141,620,000	128.654.455	98,96
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	10,000,000	0	0
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	82.060.000	71.935.000	87,66
b.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp	10,174,820,303	8.955.598.156	91,40
4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	9,892,394,303	9.300.444.260	91,35
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	282,426,000	263.168.000	93

c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	274,220,000	262.660.657	95,74
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	171.720.000	168.204.600	97,95
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	102.500.000	94.456.057	92,15
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	817,584,800	755.565.150	92,41
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	17,215,000	14.774.000	85,82
9	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Rp	223,992,800	211.401.000	94,37
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	87,903,000	84.764.000	96,42
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp	38,614,000	23.058.000	58,71
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	129,860,000	102.070.000	78,60
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	320,000,000	319.498.150	99,84
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	596,215,000	510.880.000	91,69
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	513,000,000	434.200.000	84,83
15	Pengadaan Mebel	Rp	83,215,000	75.680.000	90,94
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	4,986,042,140	4.907.595.216	75,46
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,693,000	3.380.000	59,37
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	320,392,800	291.237.493	90,90
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	4,659,95,516	4.612.977.723	98,99

g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2,204,265,000	1.495.352.260	67,83
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	1,325,500,000	887.713.427	66,71
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	67,000,000	39.465.000	58,12
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	768,200,000	541.459.333	70,48
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	42,665,000	26.714.500	62,61
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	1.127.500.000	733.145.507	48,87
h.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp	1.127.500.000	733.145.507	91,61
23	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp	1.127.500.000	733.145.507	65,02
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	4.791.564.100	4.039.731.759	92,40
i.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	1.079.250.100	999.529.278	92,61
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp	175.000.000	159.651.894	91,22
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	248.500.000	226.725.539	91,23
26	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	655.750.100	613.151.845	93,50
j.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	1.363.654.000	1.086.037.676	79,64
27	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.220.404.000	1.002.023.881	82,10

	pada Masyarakat				
28	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	143.250.000	84.013.795	58,64
k.	<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	2.348.660.000	1.954.164.805	82,30
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan unsur Pencemar	Rp	158.750.000	128.141.773	80,71
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp	2.064.910.000	1.724.153.032	83,49
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Rp	125.000.000	101.870.000	81,49
IV.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	29.652.652.486	28.632.069.108	88,48
l.	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Rp	29.652.652.486	28.632.069.108	96,55
32	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp	700.000.000	670.006.922	95,71
33	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		28.102.954.486	27.409.836.086	97,53
34	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		849.698.000	552.226.100	64,99
V.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Rp	298.198.000	255.825.150	85,79
m.	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Rp	298.198.000	255.825.150	85,79
35	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	298.198.000	255.825.150	85,79
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	386.195.000	357.429.627	70,07
n.	<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	386.195.000	357.425.627	92,55
36	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan	Rp	154.320.000	148.580.287	96,28

	dan/atau Izin PPLH				
37	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	231.875.000	208.845.340	90,06
VII.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	1.897.685.800	1.676.087.223	88,39
o.	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	1.897.685.800	1.676.087.223	88,32
38	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp	1.081.460.000	6.325.632.785	91,60
39	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp	231.620.000	182.056.913	95,56
40	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		584.605.800	515.605.923	82,04
VIII.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	176.900.000	147.441.065	34,44
p.	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	176.900.000	147.441.065	11,69
41	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp	176.900.000	147.441.065	83,34
IX.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	15.880.794.980	14.912.641.262	93,90
q.	<i>Pengelolaan Sampah</i>	Rp	15.880.794.980	14.912.641.262	93,90
42	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp	565.906.800	470.872.656	83,20
43	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	Rp	7.257.268.580	6.951.299.995	95,78

	Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
44	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp	575.614.800	517.858.251	89,96
45	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	7.482.004.800	6.972.810.350	93,19
	Jumlah Belanja	Rp	73.498.317.609	68.187.722.480	92,77

asil analisa terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2023, dengan jumlah anggaran Rp. 73.498.317.609 dengan realisasi sebesar Rp. 68.187.722.480 atau 92,77%, persentase pencapaian kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada umumnya tercapai dalam kategori baik dimana realisasi persentase fisik melebihi realisasi persentase keuangan.

Secara umum beberapa sub kegiatan berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dana, sumber daya manusia, dan kerjasama di lingkup DLHK serta antar instansi yang terkait. Namun demikian ada beberapa sub kegiatan yang masih memiliki silva yang cukup besar, walaupun kegiatan inti telah dilaksanakan secara optimal, seperti misalnya sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.127.500.000, jumlah anggaran terealisasi Rp 733.145.507. Adanya silva dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp 394.354.493,- disebabkan karena untuk penyusunan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Redeb (Bagian Wilayah Perencanaan Tanjung Redeb Timur) tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya perbaikan materi

teknis dari OPD teknis yaitu DPUPR, sedangkan untuk kegiatan lainnya yang tidak terealisasi secara maksimal seperti belanja ATK karena ada perbedaan harga antara harga di SIPD dengan harga riil di penyedia dan untuk kegiatan pembayaran honorarium Tim dikarenakan adanya batasan besaran honorarium yang boleh diterima oleh tim pelaksana kegiatan.

Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, dari jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 1.220.404.000,- terealisasi sebesar Rp 1.051.480.148,-. Dana sub kegiatan ini sebagian besar dialokasi dari DBHDR sejumlah Rp 900.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 757.507.748. Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa pengambilan sampel untuk mendapatkan data indeks kualitas air telah terlaksana 100%, serta sosialisasi dari anggaran DBHDR terealisasi 12 kecamatan dari target 13 kecamatan. Silva sebesar Rp 168.923.852,- merupakan belanja honorarium barang dan jasa, honorarium narasumber, bahan lainnya (tumbler dan seminar kit), bahan bakar minyak, atk, cetak, makan minum, sewa mobilitas air, sewa stand dekorasi, sewa Gedung dan belanja uji kalibrasi.

Sub kegiatan lain yang juga memiliki silva cukup besar adalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang merupakan DBHDR, dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.064.910.000,- terealisasi Rp 1.722.046.782,- dengan silva sebesar Rp 342.863.218,-, namun demikian kegiatan inti berupa penyerahan bibit dan peralatan pendukung serta upah kerja terealisasi dengan baik ke masyarakat penerima Gapoktan Bina Tani Mandiri Kampung Melati Jaya tercapai 100%

dengan realisasi keuangan 83%, hal ini dikarenakan tidak ada waktu untuk survey lokasi penanaman, sehingga dana BBM, makan minum rapat, belanja barang dan perjalanan dinas yang direncanakan tidak direalisasikan.

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi juga dialokasikan di sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sejumlah Rp 21.394.523.990,-, sehingga jumlah total anggaran sub kegiatan tersebut menjadi sebesar Rp 28.102.954.486,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 27.409.836.086,-, dan realisasi DBHDR sebesar Rp 20.601.612.690 atau 96,29%. Meskipun terdapat silva, pekerjaan fisik untuk DBHDR mencapai 100%, Silva dari sub kegiatan tersebut disebabkan karena adanya proses tahapan pengadaan, seperti penetapan HPS, penawaran dan negosiasi pada belanja kontruksi, pengadaan barang/alat, selain itu juga ada bahan lainnya seperti regent yang tidak direalisasi, disebabkan sulitnya ketersediaan reagent di pasaran. Penyebab lain dari adanya silva adalah adanya kenaikan harga barang di pasaran yang melebihi harga DPA.

Selain masalah tersebut di atas beberapa hal yang juga menjadi kendala diantaranya yaitu, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, adanya laboratorium lingkungan hidup yang belum terakreditasi. Untuk keberhasilan yang dicapai disebabkan adanya komitmen yang baik semua unsur OPD untuk menyelesaikan pekerjaan, serta kerjasama yang baik antar unsur OPD di DLHK.

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan						

	Hidup						
1.	Hasil perhitungan indeks kualitas Lingkungan Hidup	78,73	74,75	94,94	4.791.564.100	4.039.731.759	84,30
2.	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air	56,39	53,48	94,83	1.697.404.000	1.373.831.343	80,93
3.	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	86,07	83,76	97,30	1.697.404.000	1.373.831.343	80,93
4.	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	89,794	94,64	105,39	2.189.910.000	1.826.023.032	83,38
	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan						
5.	Pembinaan dan pengawasan terkait penataan tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	391,466	440,918	112,632	248.500.000	226.725.539	91,23
6.	Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	20 kali pembinaan/pengawasan	20	100	386.195.000	357.425.627	92,55
	Terpeliharanya ruang terbuka hijau						
7	Meningkatkan pengelolaan sampah dan peran serta masyarakat dalam pengolahan/penanganan sampah	7 pengaduan	7 pengaduan	100	176.900.000	147.441.065	83,34
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	4 lokasi					

8			4 lokasi	100	28.952.652.486	27.962.062.186	96,57
II		72%					
9			59,39%	82,48%	15.880.794.980	14.912.841.262	93,90

Dari ke 9 (Sembilan) sasaran strategis DLHK umumnya capaian target kinerja mencapai di atas 90%, bahkan mencapai lebih dari 100%. Untuk realisasi anggaran umumnya lebih dari 80%, walaupun ada beberapa indikator yang realisasi anggaran mencapai lebih dari 90%. Melihat capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi target kinerja dan realisasi anggaran DLHK sudah berjalan dengan baik.

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2023 melaksanakan 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Adapun jumlah anggaran dan realisasi keuangan per program dan kegiatan tertera pada tabel berikut:

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	19,286,827,243	17.433.155.779	92,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233,680,000	200.658.236	85,90	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141,620,000	128.654.455	98,96	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	0	0	

	Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	82.060.000	71.935.000	87,66	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,174,820,303	8.955.598.156	91,40	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9,892,394,303	9.300.444.260	91,35	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282,426,000	263.168.000	93	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274,220,000	262.660.657	95,74	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	171.720.000	168.204.600	97,95	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	102.500.000	94.456.057	92,15	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	817,584,800	755.565.150	92,41	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	17,215,000	14.774.000	85,82	
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	223,992,800	211.401.000	94,37	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,903,000	84.764.000	96,42	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	38,614,000	23.058.000	58,71	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	129,860,000	102.070.000	78,60	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,000,000	319.498.150	99,84	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	596,215,000	510.880.000	91,69	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	513,000,000	434.200.000	84,83	
	Pengadaan Mebel	83,215,000	75.680.000	90,94	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,986,042,140	4.907.595.216	75,46	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,693,000	3.380.000	59,37	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320,392,800	291.237.493	90,90	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,659,95,516	4.612.977.723	98,99	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,204,265,000	1.495.352.260	67,83	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,325,500,000	887.713.427	66,71	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	67,000,000	39.465.000	58,12	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	768,200,000	541.459.333	70,48	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42,665,000	26.714.500	62,61	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.127.500.000	733.145.507	48,87	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.127.500.000	733.145.507	91,61	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1.127.500.000	733.145.507	65,02	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.791.564.100	4.039.731.759	92,40	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.079.250.100	999.529.278	92,61	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media	175.000.000	159.651.894	91,22	

	Tanah, Air, Udara dan Laut				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	248.500.000	226.725.539	91,23	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	655.750.100	613.151.845	93,50	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.363.654.000	1.086.037.676	79,64	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.220.404.000	1.002.023.881	82,10	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	143.250.000	84.013.795	58,64	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.348.660.000	1.954.164.805	82,30	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan unsur Pencemar	158.750.000	128.141.773	80,71	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2.064.910.000	1.724.153.032	83,49	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	125.000.000	101.870.000	81,49	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	29.652.652.486	28.632.069.108	88,48	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	29.652.652.486	28.632.069.108	96,55	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	700.000.000	670.006.922	95,71	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	28.102.954.486	27.409.836.086	97,53	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	849.698.000	552.226.100	64,99	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	298.198.000	255.825.150	85,79	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	298.198.000	255.825.150	85,79	

	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	298.198.000	255.825.150	85,79	
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	386.195.000	357.429.627	70,07	
	<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	386.195.000	357.425.627	92,55	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	154.320.000	148.580.287	96,28	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231.875.000	208.845.340	90,06	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.897.685.800	1.676.087.223	88,39	
	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.897.685.800	1.676.087.223	88,32	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1.081.460.000	6.325.632.785	91,60	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	231.620.000	182.056.913	95,56	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	584.605.800	515.605.923	82,04	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	176.900.000	147.441.065	34,44	
	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	176.900.000	147.441.065	11,69	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH		147.441.065	83,34	

	Kabupaten/Kota	176.900.000			
	Program Pengelolaan Persampahan	15.880.794.980	14.912.641.262	93,90	
	Pengelolaan Sampah	15.880.794.980	14.912.641.262	93,90	
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	565.906.800	470.872.656	83,20	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.257.268.580	6.951.299.995	95,78	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	575.614.800	517.858.251	89,96	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.482.004.800	6.972.810.350	93,19	
	Jumlah Belanja	73.498.317.609	68.187.722.480	92,77	

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, pada Anggaran tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 73.498.317.609 yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 9.892.394.303

2. Belanja Langsung = Rp. 63.605.923.306

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 9 (Sembilan) Program dan 16 (enam belas) kegiatan serta 45 sub kegiatan. Anggaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut;

Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	Belanja tidak langsung	9.892.394.303	9.300.444.260	91,35

Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2023 dengan rata-rata serapan realisasi keuangan sebesar 91,35 % jika diukur dengan skala penilaian maka untuk realisasi belanja tidak langsung pada skala nilai 80 > 100 kategori penilaian baik.

Belanja langsung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	Rp	19,286,827,243	17.433.155.779	92,00
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	233,680,000	200.658.236	85,90
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	141,620,000	128.654.455	98,96
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	10,000,000	0	0
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	82.060.000	71.935.000	87,66
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	10,174,820,303	8.955.598.156	91,40
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	282,426,000	263.168.000	93
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	274,220,000	262.660.657	95,74

5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	171.720.000	168.204.600	97,95
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	102.500.000	94.456.057	92,15
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	817,584,800	755.565.150	92,41
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	17,215,000	14.774.000	85,82
8	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Rp	223,992,800	211.401.000	94,37
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	87,903,000	84.764.000	96,42
10	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp	38,614,000	23.058.000	58,71
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	129,860,000	102.070.000	78,60
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	320,000,000	319.498.150	99,84
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	596,215,000	510.880.000	91,69
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	513,000,000	434.200.000	84,83
14	Pengadaan Mebel	Rp	83,215,000	75.680.000	90,94
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	4,986,042,140	4.907.595.216	75,46
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,693,000	3.380.000	59,37
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	320,392,800	291.237.493	90,90
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	4,659,95,516	4.612.977.723	98,99
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2,204,265,000	1.495.352.260	67,83

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	1,325,500,000	887.713.427	66,71
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	67,000,000	39.465.000	58,12
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	768,200,000	541.459.333	70,48
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	42,665,000	26.714.500	62,61
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	1.127.500.000	733.145.507	48,87
h.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp	1.127.500.000	733.145.507	91,61
22	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp	1.127.500.000	733.145.507	65,02
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	4.791.564.100	4.039.731.759	92,40
i.	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	1.079.250.100	999.529.278	92,61
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp	175.000.000	159.651.894	91,22
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	248.500.000	226.725.539	91,23
25	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	655.750.100	613.151.845	93,50
j.	<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	1.363.654.000	1.086.037.676	79,64
26	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp	1.220.404.000	1.002.023.881	82,10
27	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	143.250.000	84.013.795	58,64

k.	<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	2.348.660.000	1.954.164.805	82,30
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan unsur Pencemar	Rp	158.750.000	128.141.773	80,71
29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp	2.064.910.000	1.724.153.032	83,49
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Rp	125.000.000	101.870.000	81,49
IV.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	29.652.652.486	28.632.069.108	88,48
I.	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Rp	29.652.652.486	28.632.069.108	96,55
31	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp	700.000.000	670.006.922	95,71
32	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		28.102.954.486	27.409.836.086	97,53
33	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		849.698.000	552.226.100	64,99
V.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Rp	298,198,000	255.825.150	85,79
m.	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Rp	298.198.000	255.825.150	85,79
34	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	298.198.000	255.825.150	85,79
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	386.195.000	357.429.627	70,07
n.	<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	386.195.000	357.425.627	92,55
35	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp	154.320.000	148.580.287	96,28
36	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah	Rp	231.875.000	208.845.340	90,06

	Daerah Kabupaten/Kota				
VII.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	1.897.685.800	1.676.087.223	88,39
o.	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	<i>1.897.685.800</i>	<i>1.676.087.223</i>	<i>88,32</i>
37	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp	1.081.460.000	6.325.632.785	91,60
38	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp	231.620.000	182.056.913	95,56
39	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		584.605.800	515.605.923	82,04
VIII.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	176.900.000	147.441.065	34,44
p.	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	<i>176.900.000</i>	<i>147.441.065</i>	<i>11,69</i>
40	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp	176.900.000	147.441.065	83,34
IX.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	15.880.794.980	14.912.641.262	93,90
q.	<i>Pengelolaan Sampah</i>	Rp	<i>15.880.794.980</i>	<i>14.912.641.262</i>	<i>93,90</i>
41	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp	565.906.800	470.872.656	83,20
42	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	7.257.268.580	6.951.299.995	95,78
43	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Rp	575.614.800	517.858.251	89,96

	Persampahan				
44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	7.482.004.800	6.972.810.350	93,19
a	Jumlah Belanja	Rp	63.596.923.306	58.887.278.220	92,59

realisasi belanja langsung pada tahun 2023 dengan rata-rata realisasi fisik dan keuangan sebesar 92,59 %, jika diukur dengan skala penilaian maka untuk realisasi fisik dan keuangan belanja langsung pada skala nilai 80 > 100 kategori penilaian sangat baik. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan termasuk sangat baik walaupun masih ada pengembalian anggaran dari sisa-sisa anggaran sub kegiatan, namun secara keseluruhan kegiatan inti pada umumnya telah dilaksanakan.

Secara umum dari jumlah anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sebesar Rp 73.498.317.609 terealisasi sebesar Rp 68.187.722.480 atau mencapai 92,77%. Melihat capaian tersebut, *out put* dari kegiatan dan sub kegiatan digambarkan terealisasi dengan baik, dan diharapkan akan memberikan *impact* yang baik kepada masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau ini disusun masih mengacu pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja instansi Pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD DLHK tahun 2023 pada umumnya berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp 73.498.317.609, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 68.187.722.480 atau dengan persentase 92,77%.
2. Target kinerja umumnya tercapai 100% meskipun ada beberapa yang tidak memenuhi target, untuk kedepannya diupayakan target kinerja dapat tercapai sebagaimana yang sudah ditetapkan.
3. Beberapa Indikator kinerja utama mencapai 100%, namun ada beberapa yang belum tercapai, tetapi masih dalam kategori baik. Untuk Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai diupayakan akan tetap dipertahankan dalam pelaksanaannya, dan diharapkan lebih meningkat lagi pencapaiannya sehingga benefit dari program dan kegiatan dapat terwujud.
4. Capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk kedepannya diharapkan akan lebih baik dengan mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kualitas, penyusunan anggaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja secara optimal dan memenuhi ketentuan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan diperoleh gambaran capaian kinerja dan realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau yang akuntabel sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU																									
PER 31 DESEMBER 2023																									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				PAN GKA T		JABATAN						MAS	Latihan Jabatan			PENDIDIKAN							DATA LAIN-LAIN		
											A KER JA GOL								TGL	U SI A					
N O .	NAMA	NIP	Unit Kerja	Gol.	t. m. t	NAMA	E S E.	T.M.T				NAM A	LL S	J A M	NAMA AN	JURUS AN	LL S	GEL AR	TK R	LAHI R	TEMP AT	LAHIR			

		1 004	ungan			dan			mber 2000	mber 2023	n 0 Bula n	PIM IV			Mulawa rman	mi Pemba ngunan				1969					
	Karpeg. J 065867		Hidup dan Keber sihan			Kapasitas LH										dan Perenc anaan		Sarj ana							
5	Ida Ayu, S.Pi, MP	1975100 2 200212 2 007	Dinas Lingk ungan	IV/a		Kabid PPKLH	III. b	04/04/ 2022	01 Dese mber 2002	31 Dese mber 2023	21 Tahu n 0 Bula n			Univers itas Mulawa rman	Manaje men Pesisir	20 14	Pas ca	S2	02 Oktob er 1975	48	Berau	P		Isla m	
	Karpeg L 110530		Hidup dan															Sarj ana							

19	Sri Utami Wardani, ST	19791203 2009012005	Dinas Lingkungan	III/d	01.04.2020	Pengawas Lingkungan	IV.a	30-12-2017	01 Januari 2009	31 Desember 2023	14 Tahun 11 Bulan	Diklatipim	2017	893	Univ. Sarjana Teknik Industri	2003	Sarjana S1	03 Desember 1979	44	Berau	P	Islam		
	Karpeg. N. 414835		Hidup dan Kebersihan			Hidup Ahli Muda*						IV		Taman Siswa										
20	M. Reza Pahlevi,SH	19780728 2008011008	Dinas Lingkungan	III/d	01.04.2020	Pengawas Lingkungan	IV.a	28/12/2018	01 Januari 2008	31 Desember 2023	15 Tahun 11 Bulan	-		Univ. Widya Gama Mahakam	Ilmu Hukum	2001	Sarjana SI	28 Juli 1978	45	Samarinda	L	Islam		

			Hidup dan Kebersihan			Hidup Ahli Muda*									Samari nda										
21	Muchlis, A.Md	1975032 6 199903 1 004	Dinas Lingkungan	III/d	01.04. 2022	Pengendali Dampak	IV. a	28/01/ 2015	01 Maret 1999	31 Dese mber 2023	24 Tahu n 9 Bula n		Dikla tpim	20 17	-	Univ. Hasanu ddin Makass ar	Teknik Kimia	19 96	Sarj ana	DII I	23 Maret 1975	49	Gunun g Tabur	L m	Isla m
	Karpeg. J. 018845		Hidup dan Kebersihan			Lingkungan Hidup Ahli Muda*							IV		Fak. POLIT EKNIK				Mud a						

2	Ishak Abdillah. S. Hut	1975042 5 201001 1 012	Dinas Lingk ungan	III/d	01.04. 2018	Pengendali Dampak	IV. a	17- 12- 2018	01 Janu ari 2010	31 Dese mber 2023	13 Tahu n 11 Bula n				Univ. Lambu ng Mangk urat					25 April 1975	48	Teluk Bayur	L	Isla m	
	Karpeg. Q. 202200		Hidup dan Keber sihan			Lingkungan Hidup Ahli Muda*									Fakulta s Kehuta nan										
2 3	Yuni Astuti Suhanda, A.Md	1978061 5 200012 2 001	Dinas Lingk ungan	III/d	01.10. 2022	Pengawas Lingkungan	IV. a	28/12/ 2018	01 Febr uari 2000	31 Dese mber 2023	23 Tahu n 10 Bula n				Akade mi Kesling Banjarb					15 Juni 1978	45	Murun g Pudak	P	Isla m	

	A.Md	1 007	ungan			an			ari	mber	n 11				a				ari						
									2010	2023	Bula n				Indone sia				1980						
	Karpeg. Q. 056901		Hidup dan Keber sihan			Lingkungan Hidup									Suraka rta			Mud a							
3 6	Rizki Ramdiska,S E	1987051 9 200904 1 001	Dinas Lingk ungan	III/b	01.04. 2022	Penelaah Proses di Bidang	-	-	01 April 2009	31 Dese mber 2023	14 Tahu n 8 Bula n				STIEM Tanjung g Redeb	Ekono mi Pemba ngunan	20 11	Sarj ana S1	19 Mei 1987	36	Samb aliung	L	Isla m		
	Karpeg. P 365303		Hidup dan			Lingkungan Hidup																			

1	Tulistiawan, A.Md	7 201101 1 007	Lingk ungan		20	Informasi			Janu ari 2011	Dese mber 2023	Tahu n 11 Bula n				Bandun g	men Informa tika	04	ana I	Mei 1981				m
	Karpeg. Q. 249132		Hidup dan Keber sihan			Lingkungan												Mud a					
4 2	Mulyadi	1973031 0 200604 1 016	Dinas Lingk ungan	III/a	01.04. 2022	Pengadmin istrasi	-	-	01 April 2006	31 Dese mber 2023	17 Tahu n 8 Bula n	-	-	-	SMA IPS				S M A	10 Maret 1973	51	Gunun g Tabur L	Isla m
	Karpeg. N.		Hidup			Keuangan/																	

	240965		dan Keber sihan			Pembantu Bendahara																			
4 3	Zainal Abidin	1972061 4 200701 1 024	Dinas Lingk ungan	III/a	01.10. 2023	Juru Pungut Kebersihan	-	-	01 Janu ari 2007	31 Dese mber 2023	16 Tahu n 11 Bula n	-	-	-	SMA	IPS	19 96	=	=	14 Juni 1972	51	Sungai Kupan g	L	Isla m	
4	Karpeg. N. 358857		Hidup dan Keber sihan																						
4	Toni	1973061	Dinas	III/a	01.10.	Pramu	-	-	01	31	16	-	-	-	SMA	IPS	19	-	-	13	50	Berau	L	Isla	

7	Chandra	4 200701 1 012	Lingk ungan		2023	Lapangan			Janu ari 2007	Dese mber 2023	Tahu n 11 Bula n				Tanjun g Redeb	angan	98			Juni 1980			m
	Karpeg. N. 355160		Hidup dan Keber sihan			Pengangku tan Sampah																	
4 8	Duasama Fernando	1981012 7 200701 1 003	Dinas Lingk ungan	III/a	01.10. 2023	Bendahara	-	-	01 Janu ari 2007	31 Dese mber 2023	16 Tahu n 11 Bula n	-	-	-	SMK	Keuang an	19 99			27 Janu ari 1981	43	Purbat ua	L m
	Karpeg. N		Hidup			Pengeluara																	

0	Syafranyah	9 200701 1 012	Lingk ungan		2023			Janu ari 2007	Dese mber 2023	Tahu n 11 Bula n						97			Dese mber 1977	g Redeb	m
	Karpeg.		Hidup dan Keber sihan			Informasi Lingkungan															
5 1	Abdul Wahab	1977080 6 200701 1 016	Dinas Lingk ungan	II/d	4/1/20 20	Pengawas lapangan	- -	01 Janu ari 2007	31 Dese mber 2023	16 Tahu n 11 Bula n	- -	- -	- -	SMA IPS		19 96	- -	- -	06 Agust us 1977	46 Talisan	L m
			Hidup			Petugas															

4	Sabaruddin	5 200901 1 001	Lingk ungan		21	s Lapangan			Janu ari 2009	Dese mber 2023	Tahu n 11 Bula n						00			Maret 1981	g Redeb	m
	Karpeg. P. 155376		Hidup dan Keber sihan			Petugas Kebersihan Jalan, Saluran, dan Selokan																
5	Suprianto	1982071 5 200801	Dinas Lingk	Il/d	4/1/20			01	31	15				SLTA			20			15	Ujung	Krist
5	Saleda	1 018	ungan		20	Bendahara	-	-	ari	mber	n 11	-	-	-	n	IPS	01	-	-	1982	41	ng L en

58	Rosita	197501302007012011	Dinas Lingkungan	Il/c	01.04.2020	Pengelola Keuangan			01 Januari 2007	31 Desember 2023	16 Tahun 11 Bulan				Paket C	IPS	1994			30 Januari 1975	49	Tanjung Batu/Berau	P	Islam
	Karpeg. N. 355169		Hidup dan Kebersihan																					
59	Tasmin	198007212012121002	Dinas Lingkungan	Il/c	4/1/2021	Pengawas Lapangan	-	-	01 Januari 2012	31 Desember 2023	11 Tahun 11 Bulan	-	-	-	SMU	IPS	2000	-	-	21 Juli 1980	43	Bohe Bukit/Bukut	L	Islam

										n														
	Karpeg. P.414888		Hidup dan Keber sihan			Lingkungan																		
6 4	Narsan	1980081 2 200801 1 018	Dinas Lingk ungan	II/a	01.04. 2020	Pengawas lapangan	-	-	01 Janu ari 2008	31 Dese mber 2023	15 Tahu n 11 Bula n	-	-	-	Madras ah Tsana wiah	*-	19 97	-	-	12 Agust us 1980	43	Ujung Lero	L	Isla m
	Karpeg. P.546858		Hidup dan Keber sihan			Petugas Kebersihan Jalan,																		

6		5 200701 1 036	Lingk ungan		2019	Lapangan			Janu ari 2007	Dese mber 2023	Tahu n 11 Bula n						84			Maret 1969			m	
	Karpeg. P. 155727		Hidup dan Keber sihan			Petugas Taman dan Pemakama n																		
6 7	Yuliana Langi	1968073 0 200701 2 017	Dinas Lingk ungan	II/a	01.10. 2023	Pengelola Sampah	-	-	01 Janu ari 2007	31 Dese mber 2023	16 Tahu n 11 Bula	-	-	-	SD	-	19 86	-	-	30 Juli 1968	55	Manad o	P en	Krist

Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan



Jl. APT. Pranoto No.10, Kelurahan Gayam, Tj.

Redeb,Kabupaten Berau

TANJUNG REDEB

REKAP BELANJA MODAL

Realisasi Anggaran 2023

SK

PD : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan

Tah

un : 2023

Peri

ode : 27 Maret 2024

No	Nama Pekerjaan	Tgl BAST	No. BAST	Tgl Kontrak/S	No. Kontrak/SPB	Nama Barang	KIB							
							KIB	KIB B	KIB C	KIB D	KIB	KIB F	KI	KI

				PB			A				E		B	B	
							Tana h (Rek ening Bela nja 5.2.1.)	Peralatan dan Mesin (Rekenin g Belanja 5.2.2.)	Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekeni ng Belanja 5.2.4.)	Aset Teta p Lainn ya (Rek ening Bela nja 5.2.5.)	Konst ruksi Dala m Peng erjaan	B G A T B	B H As et La in- lai n	Prop erti Inve stasi
1	Bayar sewa alat apung bermotor	9/7/2023	800 /DLHK-III/SPK/IX/2023	9/7/2023	800/DLHK-III/SPK/IX/2023	kendaraan bermotor penumpang	0	1,700,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0

	untuk penumpang kesungai belawan kec. Gunung tabur					lainnya (dst)(1)									
2	Bbelanja Alat Stodio(pengadaan Video Comference)	10/6/ 2023	800/03/Peng ..PPK/P.B.A/2023	9/8/2023	02/DLHK/Peng PPK/IX/2023	Bbelanja Alat Stodio(pengadaan Video Comference) (4)	0	45,400,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0
3	Bealanja Modal Priter	11/21 /2023	01/BAST/PRITER/PS/DLHK/XI /2023	11/17/202 3	01/PBJ/PRINTER/PS/DLHK/ XI/2023	Bealanja Modal Priter(3)	0	7,992,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0
4	Belanja	12/4/	01/BAST/MEBEL/PRTH/DLHK/	11/20/202	03/PPK/MEBEL/PRTH/DLH	Belanja	0	12,765,0	0	0	0	0	0	0	0

	Modal Mebel	2023	XII/2023	3	K/XI/2023	Modal Mebel(2)		00.00								
5	Belanja Modal Pengadaan Tangga	7/31/ 2023	01/BAST/ TANGGA/PS/DLHK/VII/2023	7/17/2023	03/PPK/TANGGA/DRAINAS E/DLHK/VII/2023	Belanja Modal Pengadaan Tangga(2)	0	7,104,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Belanja Moadal Alat Kantor Dan Rumah Tanggal(Air Conditioner 1pk Air Conditioner 1/2pk dan Shocase	10/9/ 2023	009/001/KPA-BASTP/DLHK- LAB/X/2023	9/6/2023	660.26A/001/UPT- LABLING/X/2023	Belanja Moadal Alat Kantor Dan Rumah Tanggal(Air Conditioner 1pk Air Conditioner 1/2pk dan Shocase(3)	0	16,814,2 80.00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Belanja					Belanja										
	Modal					Modal										
	Alat					Alat										
	Kantor					Kantor										
	Lainya					Lainya										
	(Drone)Bela					(Drone)Bela										
	nja					nja										
	Modal					Modal										
	Studio					Studio										
	Lainya					Lainya										
	(projektor					(projektor										
	dan belanja					dan belanja										
	komputer					komputer										
	unitlainya(pri	8/1/2	02/BAST/TOKO	AJ/IRPPLH	660.22A/405/DLHK-	unitlainya(pri	23,865,0									
7	ter)	023	KLHS/DLHK-I/VIII/2023	7/4/2023	I/VII/2023	ter)(3)	0	00.00	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Belanja					Belanja										
	Modal alat					Modal alat										
	kantor					kantor										
	lainya(Papa					lainya(Papa										
	n plang					n plang										
	Nama dan					Nama dan										
	white board)					white board)										
	Belanja					Belanja										
	Modal					Modal										
	MebelPenga					MebelPenga										
	daan AC					daan AC										
	belanjaMod					belanjaMod										
	al Alat					al Alat										
	Rumah					Rumah										
	Tangga	11/22	01/BAST/SPEKERDLL/PS/DL	10/25/202	03/PPK/Spekerdll/penguran	Tangga		38,494,8								
	lainya	/2023	HK/XI/2023	3	gan Sampah/DLHK/X/2023	lainya	0	00.00	0	0	0	0	0	0	0	0

	(HomeUse) Belanja Modal peralatanSto dioAudio (SPEAKER PORTABLE)					(HomeUse) Belanja Modal peralatanSto dioAudio (SPEAKER PORTABLE) (11)									
9	Belanja Modal Alat Pengolahan lainnya Mesin Kompos/AP PO (DBHDR)	12/4/ 2023	01/BAST/APPO/PRTH (DBHDR)/DLHK/XII/2023	10/24/202 3	01/PPK/APPO (DBHDR)/PRTH/DLHK/X/20 23	Alat Pengolahan lainnya(1)	0	51,000,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0
10	BELANJA	4/17/	01/BAP/KNDR-	3/27/2023	01/PPK/KNDR-	Sepeda	0	20,329,0	0	0	0	0	0	0	0

	MODAL KENDARAA N BERMOTO R BERODA 2	2023	R2/DLHK/IV/2023R		R2/DLHK/III/2023	Motor(1)		00.00								
11	Belanja Modal Mesin Pencacah Pelastik	11/3/ 2023	01/BAST-PBP/MSN PENCACAH /PS/DLHK/XI/2023	9/22/2023	02/PPK-SAPRAS/MESIN PENCACAH PELASTIK/DLHK/IX/2023	mesin proses lainnya (dst)(1)	0	47,000,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BELANJA MODAL PENGADAA N KENDARAA N DINAS	11/7/ 2023	01/PPK/BAST/KENDARAAN R4/DLHK/XI/2023	10/10/202 3	01/PPK- SEKRETARIAT/INNOVA/X/ 2023	Station Wagon(1)	0	372,200, 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

	OPRASI AL LAPANGAN RODA4															
13	belanja modal pengadaan mesin potong rumput	3/9/2 023	01/BAST/Baju-MSN RPT/ PENGURANGAN SAMPAH/DLHK/III/2023	2/20/2023	03/PPK/Baju- MSNRPT/PENGURNGAN	belanja modal pengadaan mesin potong rumput(4)	0	15,984,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Belanja Modal Pengadaan Laptop	11/22 /2023	01/BAST /LAPTOP/PS/DLHK/XI/2023	10/24/202 3	01/PPK - SPRAS/LAPTOP/DLHK/X/2 023	Lap Top(1)	0	10,700,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Belanja Modal	11/21 /2023	01/BAST/PRITER/PRTH/DLHK /XI/2023	11/15/202 3	01/PBJ/SP/PRITER/PRTH/ DLHK/XI/2023	Printer (Peralatan	0	11,135,5 20.00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Peralatan Komputer lainya					Personal Komputer)(1)									
16	Belanja Modal Personal - Belanja Modal Personal ComputerAll In One Belanja Modal peralatan Personal Koputer-	11/15 /2023	900/015/KPA-BASTP/DLHK- LAB/XI/2023	10/24/202 3	660.26.A/15/UPTD- LAB/X/2023	Belanja Modal Personal - Belanja Modal Personal ComputerAll In One Belanja Modal peralatan Personal Koputer-	0	26,786,2 00.00	0	0	0	0	0	0	0

	UPS 2000 KVA dan BelanjaMod al Peralatan Komputer Lainya - PeriterPerko taan					UPS 2000 KVA dan BelanjaMod al Peralatan Komputer Lainya - PeriterPerko taan(3)										
17	Belanja modal personal computer dan pengadaan Hardisk Eksternal	6/12/ 2023	01/BAST/Komputer Hardisk/PRTH/DLHK/VI/2023	5/29/2023	3	03/PPK/Komputer- Hardisk/PRTH/DLHK/VI/202	0	11,763,7 80.00	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Belanja modal personal Komputer(B elaja Modal Lap top)Dan Belanja modal Peralatan Komputer lainnya	11/13 /2023	900/007/KPA-BASTP/DLHK-III/XI/2023	11/7/2023	660.24.B/007/DLHK-III/XI/2023	Belanja modal personal Komputer(B elaja Modal Lap top)Dan Belanja modal Peralatan Komputer lainnya(2)	0	22,850,000.00	0	0	0	0	0	0	0
19	BELANJA MODAL TIMBAGAN DUDUK DIGITAL	11/9/2023	01BAST.ECOBIN.PS.DLHK.XI.2023	10/25/2023	03.PPK.ECOBIN.PERANSE RTA.DLHK.X.2023	BELANJA MODAL TIMBAGAN DUDUK DIGITAL	0	82,528,500.00	0	0	0	0	0	0	0

	TONG KOMPOSTE R PENGADAA N ECOBIN SAMPAH PELASTIK DAN KALENG					TONG KOMPOSTE R PENGADAA N ECOBIN SAMPAH PELASTIK DAN KALENG(3)									
20	Belanja modal alat alat	11/29 /2023	01/BAST/ALAT/PRTH(DBHDR) /DLHK/XI/2023	11/10/202 3	03/PPK/Alat/CV.MKP/PRTH (DBHDR)DLHK/XI/2023	Belanja modal alat alat(6)	0	81,915,7 80.00	0	0	0	0	0	0	0
21	Belanja Modal Alat Laboratoriu m Lainnya	11/13 /2023	900/010/KPA-BASTP/DLHK- LAB/XI/2023	10/27/202 3	010/PPK/-PLLH/DLHK- LAB/X/2023	Belanja Modal Alat Laboratoriu m	0	74,435,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0

						Lainya(11)									
22	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ik an/Ternak (Hand Sprayer) dan Belanja Modal Pompa	12/8/ 2023	01/BAST/HS- POMPA/PS/DLHK/XII/2023	12/12/202 3	03/PPK/Hand Sprayer- Pompa /PS/DLHK/XII/2023	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ik an/Ternak (Hand Sprayer) dan Belanja Modal Pompa(2)	7,326,00 0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
23	Belanja Modal Alat Stodio Audio	11/30 /2023	01/BAST/KAMERA/PRTH/DLH K/XI/2023	11/17/202 3	01/PPK/KAMERA/PRTH/DL HK/XI/2023	Kamera Digital(1)	15,300,0 0	00.00	0	0	0	0	0	0	0

	Belanja modal alat ukur laboratorium belajar modal komputer lainnya (belanja pengadaan SoundLevel Meter danprinter	12/1/2023	01/BAST/SOUND LEVEL-PRITER/DLHK/XII/2023	12/13/2023	660.25A/01/SOUN-LEVEL-PRITER/DLHK-IV/XI/2023	Belanja modal alat ukur laboratorium belajar modal komputer lainnya (belanja pengadaan SoundLevel Meter danprinter(2)	0	15,984,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Belanja Modal Alat- Alat	11/30/2023	01/BAST/MSN-PENCACAH/PRTH/DLHK/XI/2023	11/14/2023	01/PPK/MSN-PENCACAH/PRTH/DLHK/XI/2023	mesin proses lainnya	0	22,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
25																

	Pertenakan					(dst)(1)									
26	Belanja Modal AlatStudio lainnya Belanja Modal Personal Komputer Unit Lainnya	12/20 /2023	800/03/BAP-DLHK/XII/2023	12/6/2023	03/DLHK/Peng PPK/XII/2023	Belanja Modal AlatStudio lainnya Belanja Modal Personal Komputer Unit Lainnya(5)	0	123,487,500.00	0	0	0	0	0	0	0
27	Belanja Modal Drone	11/16 /2023	42/BASTHP/DRONE-KSPLP/DLHK-III/XI/2023	10/11/2023 3	05/PPK-ALAT KANTOR/DRONE/DLHK-III/X/2023	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran)	0	16,072,800.00	0	0	0	0	0	0	0

						Tembak Udara)(1)									
28	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan Mobil Penyiram 5000L(DBH DR)	11/6/ 2023	01/BAST/TRUK- PENYIRAM/PRTH(DBHDR)DL HK/XI/2023	8/28/2023	01/PPK/TRUK- PENYIRAM(DBHDR)PRTH/ DLHK/VIII/2023	Truck Air(1)	0	699,000, 000.00	0	0	0	0	0	0	0
29	Belanja modal kendaraan bermotor	5/24/ 2023	01/BAST/PICUP/ SAPRAS /DLHK/V/2023	3/29/2023	02/PPK/PICUP/SAPRAS/DL HK/V/2023	Belanja modal kendaraan bermotor	0	350,000, 000.00	0	0	0	0	0	0	0

	Angkutan Barang. PickUP						Angkutan Barang. PickUP(2)									
30	Belanja modal kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8/18/ 2023	01/ BAST/ RODA 3- DAK/PS/DLHK/VIII/2023	5/24/2023	02/PPK-SAPRAS/RODA -3 DAK/DLHK/V/2023		Belanja modal kendaraan Bermotor Beroda Tiga(4)	0	359,600, 000.00	0	0	0	0	0	0	0
31	Belanja Modal Kendaraan Bermotor BerodaTiga	8/11/ 2023	01/BAST/RODA3/PS/DLHK/VII I/2023	5/24/2023	02/PPK- SAPRAS/RODA3/DLHK/V/2 023		Belanja Modal Kendaraan Bermotor BerodaTiga (4)	0	195,200, 000.00	0	0	0	0	0	0	0

	Belanja					Belanja									
	Modal					Modal									
	Kendaraan					Kendaraan									
	Bermotor					Bermotor									
	Roda Tiga					Roda Tiga									
	Kendaraan					Kendaraan									
	Motor					Motor									
	Penyiram					Penyiram									
	Taman					Taman									
	Roda 3	11/2/	01/BAST/R3.PENYIRAM/PRT			Roda 3									
32	(DBH DR)	2023	H(DBH DR)DLHK/XI/2023	8/30/2023	DR)PRTH/DLHK/VIII/2023	(DBH DR)(4)	0	456,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja					Belanja									
	Modal					Modal									
	Kendaraan	9/27/	800/24/BA-PHP/KSPR-			Kendaraan									
33	Oprasional	2023	DBHDR/DLHK-III/IX/2023	8/3/2023	DC/DLHK-III/VIII/2023	Pick Up(1)	0	470,950,000.00	0	0	0	0	0	0	0

	Kantor dan atau Lapangan Roda Empat														
34	Belanja Modal Laptop	11/13 /2023	43/BASTHP/LAPTOP- DBHDR/DLHK-III/XI/2023	10/11/202 3	06/PPK- STUDIO/LAPTOP/DLHK- III/X/2023	Lap Top(1)	0	12,393,1 50.00	0	0	0	0	0	0	0
35	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Lapangan	11/9/ 2023	02/BASP/KDR- R2/DLHK/XI/2023	10/25/202 3	02/PPK/KNDR- R2/DLHK/X/2023	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Lapangan(3)	0	63,000,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0
36	Belanja Modal	6/26/ 2023	01/BAST/AC/PS/DLHK/VI/2023	6/20/2023	03/PPK/AC/DRAINASE/DLH K/VI/2023	Belanja Modal	0	13,320,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0

	Pengadaan AC					Pengadaan AC(2)										
37	Belanja Modal Pengadaan Compactor Truk	11/10 /2023	01/BAST/Compactor/PS/DLHK /XI/2023	4/29/2023	02/PPK-SPRAS/Compactor Truck6m3	Truck Sampah(1)	0	1,542,00 0,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Belanja Modal pengadaan mesin Rumput	8/30/ 2023	01/BAST/MSN- RMPT/PSPKH/DLHK/VIII/2023	8/24/2023	01/PPK/MSN- RMPT/PSPKH/DLHK/VIII/20 23	Belanja Modal pengadaan mesin Rumput (3)	0	8,658,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Belanja Modal personal omputer	K 10/30 - /2023	01/PPK /BAST/ADW- LAPTOP/DLHK/X/2023	10/19/202 3	660.25C/01/ADW- LAPTOP/DLHK-IV/X/2023	Net Book(1)	0	13,000,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0	0

	(laptop)															
40	Belanja Modal Pralatan Laboratoriu m lainnya	11/27 /2023	900/016/KPA-BASTP/DLHK- LAB/XI/2023	11/7/2023	016/PPK-PPLH/DLHK- LAB/XI/2023	Belanja Modal Pralatan Laboratoriu m lainnya(10)	55,260,0 0	00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Belanja pengadaan Perahu/ Kapal	8/24/ 2023	01/BAST/Perahu/PS/DLHK/VII/ 2023	6/26/2023	03/PPK/Perahu/PS/DLHK/VI /2023	Kapal Bantu Umum(1)	160,950, 0	000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Belanja Pengadaan Mebel	12/18 /2023	800/01/Peng.MBL/PEJ- PHP/XII/2023	11/23/202 3	01/DLHK/PENG.MBL/XI/202 3	Belanja Pengadaan Mebel(6)	75,680,0 0	00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pengadaan alat pendingin	3/29/ 2023	01/BAST/AC .dII/PRTH/DLHK/III/2023	3/29/2023	03/PPK/AC.dII/CV.KJU/PRT H/DLHK/II/2023	pengadaan alat pendingin	13,098,0 0	00.00	0	0	0	0	0	0	0	0

	AC (air conditioner)					AC (air conditioner)(2)										
44	Pengadaan Komputer	10/30/2023	01/BAST /COMP-GAKKUM/DLHK-IV/X/2023	10/16/2023	6625B/01/COMP-GAKKUM/DLHK-IV/2023	Personal Computer(1)	0	9,934,50	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pengadaan Mesin Potong Rumput	9/20/2023	01/BAST/MSN-RMPT/PS/DLHK/IX/2023	9/14/2023	01/PBJ/MSN-RMPT/PS/DLHK/IX/2023	Pengadaan Mesin Potong Rumput (3)	0	8,658,00	0	0	0	0	0	0	0	0
46	PENGADAAAN PROYEKTO R	10/30/2023	02/PPK/ BAST / Proklam-proyektor Infokus /DLHK/X/2023	10/11/2023	660/25/02/Proklam-proyektorInfokus/DLHK-IV/X/2023	Proyektor Romad Complet(1)	0	5,180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pengadaan trafficone	3/29/2023	01/BAST/AC .dii/PRTH/DLHK/III/2023	3/29/2023	03/PPK/AC.dii/CV.KJU/PRT H/DLHK/II/2023	Traffic Counter(1)	0	3,330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Belaja	11/23	04/BASTPK/PPK/Pemeliharaan	10/11/202	03/PPK/Pemeliharaan-	Taman Semi	0	0	74,255,00	0	0	0	0	0	0	0

	pemeliharaan n pot Median Jalan	/2023	Pot/CV- CBT/PSPKH/DLHK/XI/2023	3	Pot/CV- CBT/PSPKH/DLHK/X/2023	Permanen(1)			0.00							
49	Belanja Fisik Kegiatan RTH Eks.PDAM Bukit Maritim(DB HDR)	12/22 /2023	03/BASTHP-PHO/PPK- PRTH/RTH BKTMRM/DBHDR/XII/2023	10/13/202 3	001/CCO-01 RTH BKT MRTM/DBHDR/X/2023	Taman Permanen(1)	0 0	0 0	3,866,660 ,373.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
50	Belanja Konsultan Perencanaan n penataan Lahan	11/7/ 2023	BASTPK /PPK /PRC/PENATAAN LHN KBRN /DLHK/XI/2023	10/9/2023	03/PPK/PRC/PENATAAN LHN KBRN/DLHK/X/2023	Makam Bersejarah(1)	0 0	0 0	12,432,00 0.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

	Kuburan Muslimin Jalan Bukit Berbunga Sambaliung														
51	Belanja Konsultan Perencanaa n penataan Lokasi Pembibitan JL.Sultan Agung	11/7/ 2023	04/BASTPK/PPK /PRC/PENATAAN LOK PEMBIBITAN /DLHK/XI/2023	10/9/2023	03/PPK /PRC /PENATAAN LOK.PEMBIBITAN/DLHK/X/ 2023	Taman Semi Permanen(1)	0	0	13,764,00 0.00	0	0	0	0	0	0
52	Belanja modal (Rehab	12/1/ 2023	800/02/PPK- PEMRUT.KANTOR/XII/2023	11/3/2023	02/DLHK/PEMRUT.KANTO R/XII/2023	Bangunan Gedung Kantor	0	0	99,000,00 0.00	0	0	0	0	0	0

	ruang rapat dan ruangloby kantorDLHK)					Permanen(1)									
53	Belanja modal rehab gedung kantor DLHK (Pembuatan Pagar)	9/29/ 2023	008/02/PEMERUT KANTOR/IX/2023	7/3/2023	02/DLHK/PEMERUT KANTOR/VII/2023	Pagar Permanen(1)	0	0	195,000,0 00.00	0	0	0	0	0	0
54	Belanja Review DED Masterplan RTH	12/21 /2023	08/BASTPP-PRTH/RV MRKKTB/RV MKKTB/DBHDR/XIII/2023	11/22/202 3	03/PPK-PRTH/RV MRKKTB/DBHDR/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	99,442,68 0.00	0	0	0	0	0	0

	KantorKecamatan Teluk Bayur(DBHDR)														
55	Belanja Fisik Kegiatan RTH Jalan Perjuangan (DBHDR)	9/12/2023	01/BAP - UM/RTH.JL.PERJUANGAN/D BHRDR/X/2023	9/15/2023	04/PPK-PRTH/JL. PERJUANGAN/DBHDR/IX/2023	Taman Permanen(1)	0	0	1,649,071,415.00	0	0	0	0	0	0
56	Belanja Fisik Kegiatan RTH JL.Dr. Murjani III Korpri 1612(DBHDR)	12/22/2023	02/BASTHP-PHO/MRJN III 1612/DBHDR/XII/2023	10/26/2023	04/.1/PPK-PRTH-ADD-1/MRJN III 1612/DBHDR/X/2023	Taman Permanen(1)	0	0	2,214,462,855.00	0	0	0	0	0	0

57	Belanja fisik kegiatan RTH Eks .PDAM.Bukit Maritam(DB HDR)	10/12 /2023	00/BAP- UMRTHBKTMRM/DBHDR/X/ 2023	9/15/2023	04/PPK-PRTH/RTH BKT MRTM/DBH DBHDR/IX/ 2023	Taman Permanen(1)	0	0	1,657,140 ,160.00	0	0	0	0	0	0
58	Belanja Fisik Kegiatan RTH Jalan Perjuangan(DBHDR)	12/22 /2023	02/BASTHP-PHO/JL PRJNGN/DBHDR/XII/2023	10/22/202 3	04.1/PPK-PRTH-ADD-01/JL PRJNGN/DBHDR/X/2023	Taman Permanen(1)	0	0	3,847,833 ,300.00	0	0	0	0	0	0
59	Belanja Fisik Kegiatan RTH Jln.Dr.Murja nIII	10/12 /2023	01/BAP-UM/RTH MRJN.III1250/DBHDR/X/2023	9/15/2023	04/PPK-PRTH/MRJN III 1250/DBHDR/IX/2023	Taman Permanen(1)	0	0	928,210,1 58.00	0	0	0	0	0	0

	Krpri1250(D BHDR) UangMuka														
60	Belanja Fisik Penataan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	11/19 /2023	06/ BASTPP- PPK/RBRA/CV.HP/PSPKH/DL HK/XII/2023	11/10/202 3	03/PPK /RBRA/CV.HP/PSPKH/DLH K/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	194,498,0 00.00	0	0	0	0	0	0
61	Belanja FisikKegiatan RTHJI.Dr Murjani III Korpri1250(DBH DR)	11/21 /2023	03/BASTPHP/PPK- PRTH/MRJN III 1250 /DBH DR/XI/2023	10/13/202 3	01/CCO-01/MRJ III 1250/DBH DR/X/2023	Taman Permanen(1)	0	0	2,165,823 ,702.00	0	0	0	0	0	0

62	Belanja Konsultan Pengawas Penataan Lokasi PembibitanJ I. Sultan Agung	11/15 /2023	04/BASTPK/PPK/PGWS/PENA TAAN -LOK- BBT/PRTH/DLHK/XII/2023	11/16/202 3	03/PPK/PGWS/PENATAAN LOK.BBT/PRTH/DLHK/XI/2 023	Taman Semi Permanen(1)	0	0	9,812,000 .00	0	0	0	0	0	0
63	Belanja Konsultan Pengawas Penataan Taman Cendana	12/15 /2023	04/BASTPK/PGWS/PENTAAN - TMN CND/PRTH/DLHK/XII/2023	11/16/202 3	03/PPK/PGW/PENATAAN- TMN CND/PRTH/DLHK/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	6,549,000 .00	0	0	0	0	0	0
64	Belanja Konsultan	12/21 /2023	BASTPK/PPK/PGWS/PENATA AN -LHN-	11/22/202 3	03/PPK/PGWS/PENATAAN- LHN-	Makam Bersejarah(0	0	8,813,000 .00	0	0	0	0	0	0

	Pengawasan Penataan LahanKuburan Muslimin JL.Bukit BerBunga Sambaliung		KBRN/PRTH/DLHK/XII/2023		KBRN/PRTH/DLHK/XI/2023	1)										
65	Belanja Konsultan Pengawasan Penataan Ruang bermain Ramah Anak(RBRA)	12/22 /2023	08/BASTPK/PPK/01.07/PWS.P ENATAAN RBRA/DLHK/XII/2023	11/25/2023	03/PPK/01.07/PWS.PENAT AAN RBRA/DLHK/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	9,740,000.00	0	0	0	0	0	0	0

66	Belanja Konsultan Perencanaan penataan Taman Cendana	11/7/ 2023	04/BASTPK/PPK /PRC/PENATAAN CDNA/DLHK/XI/2023	TMN	10/9/2023	03/PPK/PRC/PENATAAN TMN CDNA/DLHK/X/2023	Taman Semi Permanen(1)	0	0	9,268,500 .00	0	0	0	0	0	0
67	Belanja modal lanjutan Penataan Taman Murjani III	8/18/ 2023	04/BASTPK/PPK/TMN .MURJANI /PRTH/DLHK/VIII/2023		5/22/2023	03/PPK/TMN MURJANI /PRTH/DLHK/V/2023	Taman Semi Permanen(1)	0	0	168,685,0 00.00	0	0	0	0	0	0
68	Belanja Modal pemagaran Taman	7/17/ 2023	04/ BASATPK/PPK/PTC/PRTH/DL HK/VII/2023		5/22/2023	03/PPK/PTC/PRTH/DLHK/V /2023	Pagar Permanen(1)	0	0	189,638,0 00.00	0	0	0	0	0	0

	Cendana														
69	Belanja Modal Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor DLHK,UPT Laboratoriu m danUPT TPA Bujangga	12/21 /2023	800/05/PEMRUT.KANTOR/XII/ 2023	12/6/2023	05/DLHK/PEMRUT.KANTO R/XII/2023	Bangunan Gedung Kantor Permanen(1)	0	0	9,512,207 .00	0	0	0	0	0	0
70	Belanja Modal	11/2/ 2023	02/BASTPK/Median - Gatsu/PRTH/DLHK/XI/2023	9/4/2023	03/PPK/Median - Gatsu/PRTH/DLHK/IX/2023	Taman lainnya(1)	0	0	189,443,0 00.00	0	0	0	0	0	0

	Lanjutan Penataan Median Jalan Gatot Suberoto10 0%														
71	Belanja Modal Rehab Gedung Kantor DLHK ,UPTLaborat orium Dan UPT Bujangga	11/21 /2023	800/04/PEMRUT. KANTOR/XII/2023	11/6/2023	03/DLHK/PEMRUT.KANTO R/XII /2023	Bangunan Gedung Kantor Permanen(1)	0	0	191,696,1 26.00	0	0	0	0	0	0

72	Belanja Modal Perencanaan Rehab Gedung kantor DLHK,UPTD Laboratorium dan UPTD TPA Bujangga	12/4/ 2023	800/PEMERUT.KANTOR/XII/2 023	12/22/202 3	03/DLHK/PEMERUT KANTOR/XI/2023	Bangunan Gedung Kantor Permanen(1)	0	0	13,375,50 0.00	0	0	0	0	0	0
73	Belanja Pemeliharaan Taman (H.isa	12/8/ 2023	04/BASTPK/PPK/Pemeliharaan -RTH/PRTH/DLHK/XII/2023	12/24/202 3	03/PPK/Pemeliharaan - RTH/PRTH/DLHK/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	11,714,00 0.00	0	0	0	0	0	0
74	Belanja	12/21	04/BASTPK/PPK/Pemeliharaan	12/22/202	03/PPK/Pemeliharaan-TMN-	Taman	0	0	119,513,0	0	0	0	0	0	0

	Pemeliharaan Taman (Lampu Taman)	/2023	.TMN- LAMPU/PRTH/PRTH/DLHK/XII /2023	3	LAMPU/PRTH/DLHK/XI/2024	Permanen(1)			00.00							
75	Belanja pemeliharaan Taman(POT MEDIAN JL.ATPRA NOTO)	12/12 /2023	04/BASTPK/PPK/Pemeliharaan n-TMN- JLAPT/PRTH/DLHK/XII/2023	11/23/2023	03/PPK/Pemeliharaan - Taman Semi Permenan(1)		0	0	97,843,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0
76	Belanja Pemeliharaan Taman(POT MEDIAN	12/21 /2023	04/BASTPK/PPK /Pemeliharaan-TMN-POT- JLPMD/PRTH/DLHK/XII/2023	12/2/2023	03/PPK/Pemeliharaan-TMN-POT- JL.PMD/PRTH/DLHK/XII/2023	Taman lainnya(1)	0	0	71,344,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0

	JL.PEMUDA)															
77	Belanja pemeliharaan RTH	12/4/2023	04/BASTPK/PPK/PemlhRTH/CV./PSPKH/DLHK/XII/2023	11/22/2023	03/PPK/PemlhRTH/CV.CM/PSPKH/DLHK/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	165,790,00.00	0	0	0	0	0	0	0
78	Belanja Pemeliharaan Taman (Taman Sanggam)	12/21/2023	04/BASTPK/PPK/Pemeliharaan Taman TMN-SGGM/PRTH/DLHK/XII/2023	11/27/2023	03/PPK/Pemeliharaan-TMN-SGGM/PRTH/DLHK/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	44,287,00.00	0	0	0	0	0	0	0
79	Belanja penataan Lokasi pembibitan Jl. Sultan Agung	12/15/2023	01/BASTPK/PPK/PENATAAN - LOK BBT/CV-KUP/PRTH/DLHK/XII/2023	11/16/2023	03/PPK/PENATAAN LOK BBT/CV.KUP/PRTH/DLHK/XI/2023	Taman Semi Permanen(1)	0	0	197,319,00.00	0	0	0	0	0	0	0

80	Belanja Fisik Kegiatan RTH.Jln Dr Murjani III Korpri1612(DBHDR)	9/12/ 2023	01/BAP-UM/RTH MRJN.III1612/DBHDR/X/2023	9/15/2023	05/PPK/PRTH/MRJN III1612/DBHDR/IX/2023	Taman Permanen(1)	0	0	949,055,5 09.00	0	0	0	0	0	0
81	Konsultan Pengawas pemagaran Taman Cendana	7/17/ 2023	04/BASTPK/PPK/PGWS/PTC/ PRTH/DLHK/VII/2023	5/22/2023	03/PPK/PGWS/PTC/PRTH/ DLHK/V/2023	Pagar Permanen(1)	0	0	9,390,000 .00	0	0	0	0	0	0
82	Konsultan Pengawas Kegiatan RTH JI.Dr Murjani III	12/21 /2023	03/PPK -PRTH/PWS.MRJN III 1250/DBHDR/XI/2023	9/18/2023	03/PPK/PRTH/PWS/1250/D BHDR/IX/2023	Taman Permanen(1)	0	0	99,831,18 0.00	0	0	0	0	0	0

	Korpri1250 (DBHDR)														
83	Konsultan Pengawasan Kegiatan RTH Eks. PDAM.Bukit Maritam(DB HDR)	12/22 /2023	07/BASTPP/PRTH/PWS RTH BKT MRTM/DBHDR/XII/2023	9/19/2023	03/PPK-PRTH/PWS RTH BKT MRTM/ DBHDR/IX/2023	Taman Permanen(1)	0	0	99,886,68 0.00	0	0	0	0	0	0
84	Konsultan Pengawasan Kegiatan RTH Jalan Perjuangan (DBH DR)	12/22 /2023	04/BASTP/KPA-PPK/PWS JL PRJNGN/DBHDR/XII/2023	9/18/2023	03/PPK-PRTH/PWS JL PRJNGN/DBHDR/IX/2023	Taman Permanen(1)	0	0	99,220,68 0.00	0	0	0	0	0	0

85	Konsultan Pengawasan Kegiatan RTH JL.Dr Murjani III Korpri 1612(DBH DR)	12/22 /2023	04/BAST-PPK/PRTH/PWS MRJN III 1612/DBHDR/XII/2023	9/18/2023	03/PPK-PRTH/PWS MRJN III1612/DBHDR/IX/2023	Taman Permanen(1)	0	0	99,897,78 0.00	0	0	0	0	0	0
86	Konsultan Pengawasan lanjutan penataan Median Jalan Gatot Suberoto	11/2/ 2023	04/BASTPK/PPK/PGWS/Media n -Gatsu/PRTH/DLHK/IX/2023	9/4/2023	03/PPK/PGWS/ Gatsu/PRTH/DLHK/IX/2023	Taman lainnya(1)	0	0	9,400,000 .00	0	0	0	0	0	0
87	Konsultan	8/18/	04/BASTPK/PPK/PGWS/TMN	5/22/2023	03/PPK/PGWS/TMN	Taman Semi	0	0	8,350,000	0	0	0	0	0	0

	Pengawasa n Lanjutan Penataan Taman Murjani III	2023	MURJANI PRTH/DLHKVIII/2023		MURJANI/PRTH/DLHK/V/20 23	Permanen(1)			.00						
88	Konsultan perencanaa n Lanjutan Penataan Taman murjani III	4/11/ 2023	04/BASTPK/PPK/PRC-TMN .Murjani /DLHK/IV/2023	3/13/2023	03/PPK/PRC-TMN MURJANI/DLHK/III/2023	Taman Semi Permanen(1)	0 0	0 0	11,793,00 0.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
89	Konsultan Perencanaa n Penataan Ruang Bermain	11/3/ 2023	03/BASTPK/PPK/01.07/PRC.P ENATAAN RBRA/DLHK/XI/2023	10/20/202 3	03/PPK/01.07/PRC- PENATAAN RBRA/DLHK/X/2023	Taman Permanen(1)	0 0	0 0	13,630,00 0.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

	Ramah anak (RBRA)														
90	Konsultan Perencanaan Lanjutan Penataan Median Jalan Gatot Subroto	7/31/ 2023	04/BASTPK/PPK/PRC- LANJ.PENTAAN MEDIAN /DLHK/VII/2023	7/17/2023	03/PPK/PRC-LANJ PENATAAN MEDIAN /DLHK/VII/2023	Taman lainnya(1)	0	0	13,185,00 0.00	0	0	0	0	0	0
91	Konsultan perencanaan Pemagaran Taman Cendana	3/17/ 2023	04/BASTPK/PPK/PRC- PGR.TMN CENDANA/DLHK/III/2023	2/16/2023	03/PPK/PRC-PGR.TMN CENDANA/DLHK	Pagar Permanen(1)	0	0	13,153,00 0.00	0	0	0	0	0	0
92	Konsultan	3/17/	04/BASTPK/PPK/PRC-	2/16/2023	03/PPK/PRC/-TMN.JL.KI	Taman	0	0	11,877,00	0	0	0	0	0	0

	Perencanaan Penataan Taman JL.KH.Dewantara	2023	TMN/JL.KI HAJAR DEWANTARA/DLHK/III/2023		HAJAR DEWANTARA/DLHK/II/2023	Permanen(1)			0.00							
93	Pembuatan Tong Sampah Median Jalan	11/29 /2023	01/BAST/PEMB.TONG SAMPAH/PS/DLHK/XI/2023	11/1/2023	03/PPK/Pemb.Tong Sampah/DLHK/XI/2023	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)(1)	0	0	19,314,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0
94	Pemeliharaan Taman (Taman Cendana)	12/21 /2023	04/BASTPK/PPK P/pemeliharaan- RTH/PRTH/DLHK/XII/2023	11/27/2023	03/PPK/Pemeliharaan-TMN- CND/PRTH/DLHK/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	52,902,00 0.00	0	0	0	0	0	0	0
95	Penataan Lahan	12/15 /2023	04/BASTPK/PPK/PENATAAN - LHN-	11/22/2023	03/PPK/PENTAAN-LHN- KBRN/CV/.MJK/PRTH/DLH	Makam Bersejarah(0	0	177,901,0 00.00	0	0	0	0	0	0	0

	Kuburan Muslimin Jl.Bukit Berbunga Sambaliung		KBRN/CV.MJK/PRTH/DLHK/XI I/2023		K/XI/2023	1)									
96	penataan Taman Cendana	12/15 /2023	04/BASTPK/PPK/PENATAAN - TMN-CND/CV .CBT/PRTH/DLHK/XII/2023	11/6/2023	03/PPK/PENATAAN TMN- CND/CV- CBT/PRTH/DLHK/XI/2023	Taman Permanen(1)	0	0	133,413,0 00.00	0	0	0	0	0	0
97	Pengadaan Dokumen Perencanaa n Pengadaan Tanah	10/16 /2023	04/BAST/KPA- PPK/DPPT/Sapras/DLHK/X/2) 23	9/5/2023	03/PPK/DPPT/Sapras/DLHK /IX/2023	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen(1)	0	0	99,597,52 5.00	0	0	0	0	0	0

98	Perencanaan teknis masterplan dan perencanaan teknis Detaliet Engineering Design (DED Lapangan batuakkal (DBHDR	11/10/2023	03/BASTP/KPA-PPK/MP DED BTWKKL/PRTH DBHDR/DLHK/XI/2023	10/10/2023	03/PPK-PRTH/MP DED BTWKKL/DBHDR/X/2023	Taman lainnya(1)	0	0	145,459,195.00	0	0	0	0	0	0
99	Prencanaan Teknis Masterplan	12/18/2023	03/BSTP/KPA -PPK/MP DED BTWKKL/PRTH DBHDR/DLHK/XII/2023	10/10/2023	03/PPK-PRTHMP DED BTWWKL/DBHDR/X/2023	Taman Permanen(1)	0	0	339,404,788.00	0	0	0	0	0	0

	dan Perencanaan Teknik Detailed Engineering Design (DED) Lapangan Batiwakkal (DBHDR)														
100	Konsultan Pengawas Semenisasi Jalan Masuk TPST Tanjung	10/4/ 2023	04/BASTPK/PPK/Pgws .Semenisasi TPST Tg Batu/PS/DLHK/X/2023	8/21/2023	03/PPK/Pgws Semeniasi TPST Tg Batu /Sapras/DLHK/VIII 2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	9,601,0 00.00	0	0	0	0	0

	Batu UPT Kebersihan Kec,Pulau Derawan dan Maratua														
101	Konsultan Perencanaan lanjutan Lanjutan Semenisasi Tempat Parkir Bidang Kebersihan	7/12/ 2023	04/BASTPK/Prcn Semenisasi TPBK/PS/DLHK/VII/2023	lant 6/13/2023	03/PPK/Prcn Lant.Semenisasi TPBK/PS/DLHK/VI/2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	10,389, 000.00	0	0	0	0	0
102	Konsultan Prencanaan	2/24/ 2023	04/BASTPK/PPK/Prcn.Semeni sasi/PS/DLHK/III/2023	1/26/2023	03/PPK/Prc.Semenisasi/PS/ DLHK/II/2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	13,675, 000.00	0	0	0	0	0

	Semenisasi Jalan Masuk TPA Kec Talisayan														
103	Konsultan Pengawas Lanjutan Semenisasi Tempat Pakir Bidang Kebersihan 100%	10/27 /2023	04/BASTPK/PPK/ Pgws Lanj- Semenisasi TPBK/PS/DLHK/X/2023	8/29/2023	03/PPK/Pgws Lanj- Semen TPBK /Spras/DLHK/VIII/2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	7,076,0 00.00	0	0	0	0	0
104	Konsultan pengawas pembuatan TPS 100%	10/13 /2023	04/BASTPK/PPK/Pgws.Pemb TPS/PS/DLHK/X/2023	10/15/202 3	03/PPK/Pgws.Pemb TPS Sapas/DLHK/VIII/2023	Bangunan Pelimpah Sampah(1)	0	0	0	3,463,0 00.00	0	0	0	0	0

105	Konsultan Pengawas Semenisasi Jalan Masuk TPA Kecamatan Talisayan	8/28/ 2023	04/BASTPK/PPK/Pgws. SJM TPA Talisayan/PS/DLHK/VIII/2023	5/31/2023	03/PPK/Pgws Semenisasasi Talisayan/Sapras/DLHK/V/2 023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	9,657,0 00.00	0	0	0	0	0
106	Konsultan Perencanaan Pembuatan TPS	7/12/ 2023	04/BASTPK/PPK /Pemb .TPS/PS/DLHK/VII/2023	6/13/2023	03/PPK/Pemb.TPS/DLHK/P S/DLHK/VI/2023	Bangunan Pelimpah Sampah(1)	0	0	0	4,828,0 00.00	0	0	0	0	0
107	Konsultan Perencanaan Semenisasi Landasan Arm Roll	10/31 /2023	04/BASTPK/PPK/Prcn semenisai Lnd Arm Roll/PS/DLHK /X/2023	10/2/2023	03/PPK/Prcn Semenisasi Land Arm Roll /PS/DLHK/X/2023	Jalan Kereta Lain-lain(1)	0	0	0	10,289, 000.00	0	0	0	0	0

108	Konsultan Perencanaan Semenisasi Jalan Masuk TPST Di Tanjung Batu UPT Kebersihan	7/12/ 2023	04/BASTPK/PPK/Prcn Semenisasi Tg Batu /PS/DLHK/VII/2023	6/13/2023	03/PPK/Prcn Semenisasi Tg Batu/PS/DLHK/VI/2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	13,530, 000.00	0	0	0	0	0
109	Kosultan Pengawasa n Semenisasi Landasan Arm Roll	11/12 /2023	04/BASTP/PPK/Pgws Semenisasi land Arm Roll/Sapras/DLHK/XII/2023	11/14/202 3	03/PPK /Pgws Semenisasi Landasan Arm Roll/Sapras/DLHK/XI/2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	7,215,0 00.00	0	0	0	0	0

110	Lanjutan Semenisasi Tempat Parkir Bidang Kebersihan 100%	10/27 /2023	04/ BASTP/KPA-PPK/Lanj- semenisasi TPBK/Sapras /DLHK/X/2023	9/4/2023	04/PPK-ADD1/Lanj .Semenisasi TPBK/Sapras/DLHK/IX/2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	154,376 ,000.00	0	0	0	0	0
111	Pembuatan TPS () Tempat Pembuangan n Sampah)	10/13 /2023	04/BASTP/PPK/ Pem.TPS/Sapras /DLHK/X/2023	8/21/2023	04/PPK-ADD1 /Pem.TPS/Spras./DLHK/VIII/ 2023	Bangunan Pelimpah Sampah(1)	0	0	0	69,369, 241.00	0	0	0	0	0
112	Pengadaan Lampu Solar Cell	10/16 /2023	01/BAST/Solar Cell/PS/DLHK/X/2023	9/6/2023	03/PPK/SolarCell/PS/DLHK/ IX/2023	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas	0	0	0	103,452 ,000.00	0	0	0	0	0

						Kecil(1)									
113	Semenisasa i Jalan Masuk TPA .Kec Talisayan	8/28/ 2023	04/BASTPK/PPK/ Semenisasi Talisayan /Sapras/DLHK/VII/2023	5/31/2023	03/PPK/Semenisasi Talisayan /Sapras/DLHK/V/2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	197,000 ,000.00	0	0	0	0	0
114	Semenisasa i Jl, Masuk TPST Tanjung Batu UPT kebersihan Pulau Derawan Dan Maratua	10/4/ 2023	04/BASTP/PPK/ Semenisasi Tanjung Batu/Sapras/DLHK/X/2023	8/21/2023	03/PPK/Semenisasi TPST Tanjung Batu/Sapras/DLHK/VIII/2023	Jalan lainnya(1)	0	0	0	194,264 ,396.00	0	0	0	0	0

	Semenisasi		04/BASTP/PPK/Semenisasi		03/PPK/Semenisasi	Land										
	Ladasan	12/12	Land	Arm	11/14/202	Arm	Jalan				149,400					
115	ArmRoll	/2023	Roll/Sapras/DLHK/XII/2023	3	Roll/Sapras/DLHK/XI/2023	lainnya(1)		0	0	0	,000.00	0	0	0	0	0
									5,698,14	20,938,59	957,584					
						JUMLAH		0	4,810.00	7,313.00	,637.00	0	0	0	0	0



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur

2023



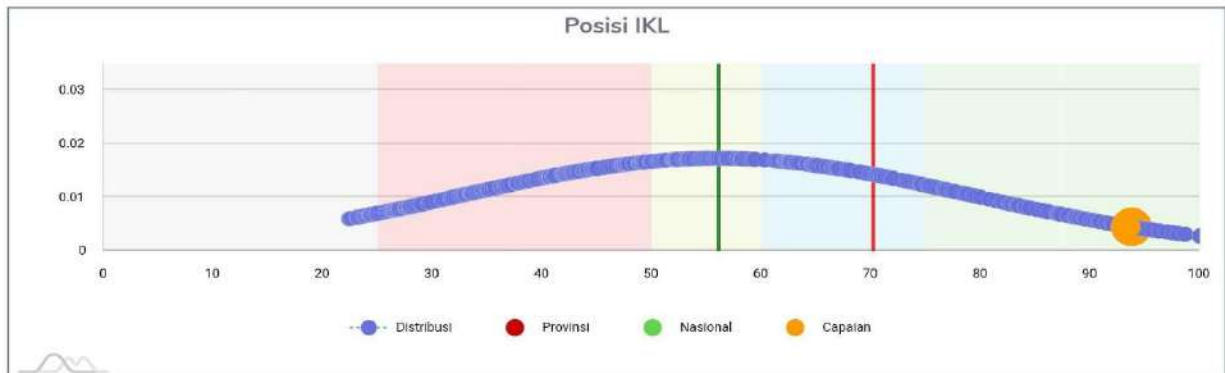
IKL
93.76

SANGAT BAIK
Indeks Respon IKL
26.00

Peringkat

Nasional: 16 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 2 dari 10 Kabupaten/Kota



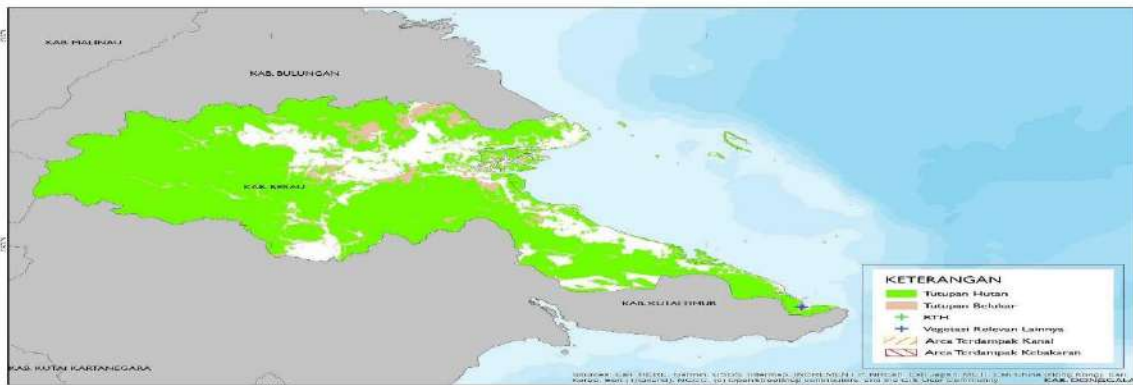
Indeks Respon Tutupan Lahan

— Capaian Kabkota - - - Capaian Provinsi

Indeks Respon Ekosistem Gambut

— Capaian Kabkota - - - Capaian Provinsi

Kualitas Tutupan Lahan



Rekomendasi

Mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan. Melakukan pengayaan dan pemeliharaan tutupan hutan pada APL. Mempertahankan dan meningkatkan tutupan belukar dalam kawasan melalui kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman yang telah ada pada area berfungsi lindung (sempadan sungai dengan kemiringan >25%) untuk mempertahankan serta meningkatkan luas belukar pada fungsi lindung. Mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya yang telah ada. Meningkatkan luasan RTH serta Tutupan Vegetasi Relevan lainnya melalui pelibatan OPD terkait...



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur
2023

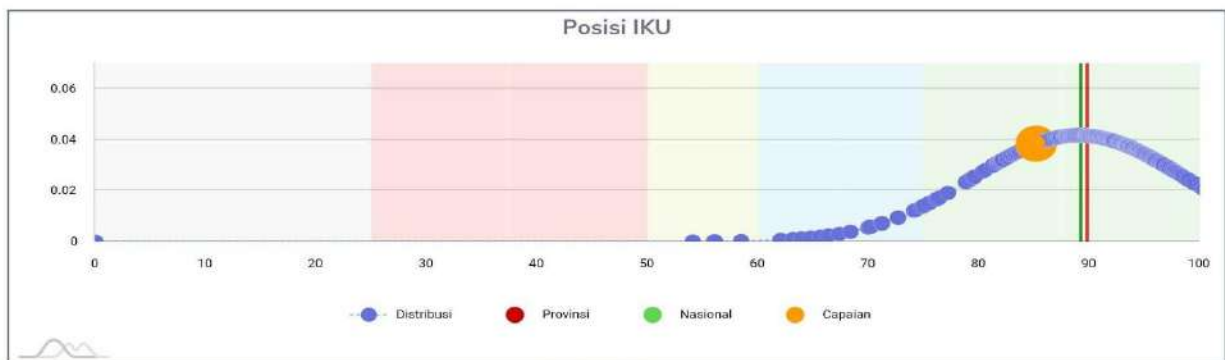


IKU
85.17
BAIK
Indeks Respon IKU
16.75

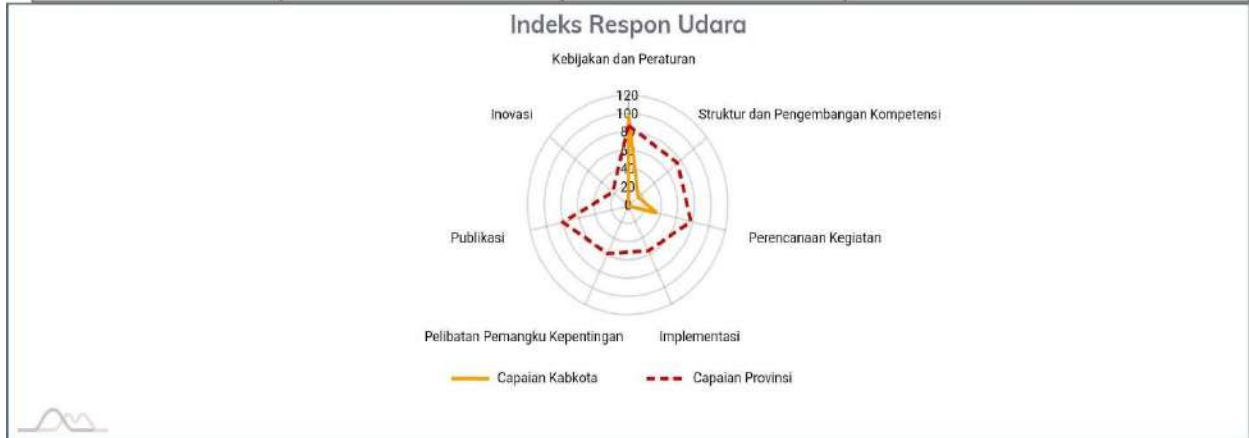
Peringkat

Nasional: 365 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 10 dari 10 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	4	8	7
KAB/KOTA	4	0	0
TOTAL	12	16	15



Rekomendasi

Untuk Program Indeks Respon Kinerja Daerah sudah mengisi aplikasi Indeks Respon Kinerja Daerah untuk Program Langit Biru tetapi tidak ada data-data yang dicantumkan, diharapkan untuk tahun depan dapat melakukan pengisian data pada aplikasi Indeks Respon dengan lengkap.



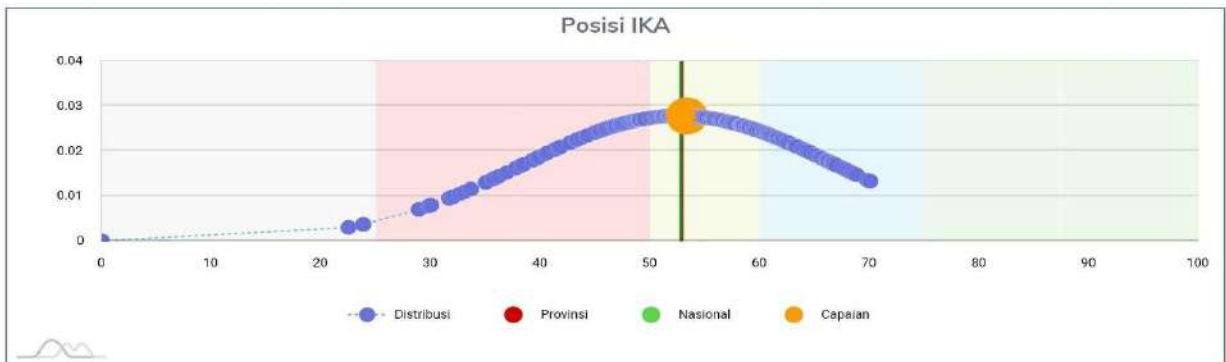
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur



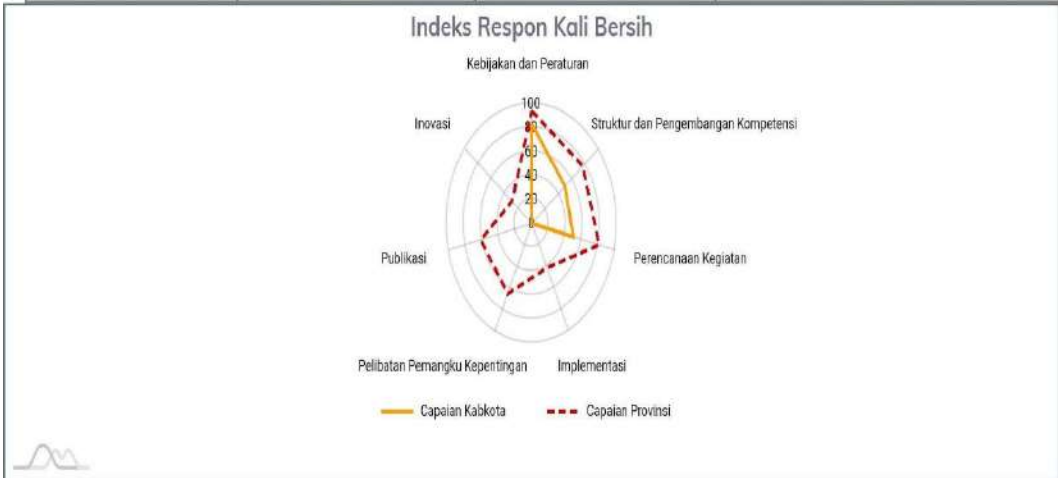
IKA
53.33
SEDANG
Indeks Respon
5.42

Peringkat

Nasional : 133 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 4 dari 10 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	0	0	0
P3E	0	0	0
PROVINSI	6	12	12
KAB/KOTA	17	18	18
TOTAL	23	30	30



Sebaran Titik Pemantauan

Rekomendasi



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur

2023



Kepala Daerah : Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd.

Luas Wilayah : 2100863.97416012 Km²

Populasi : 248,035 Jiwa

Kepala DPRD : Madri Pani, SE

Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL

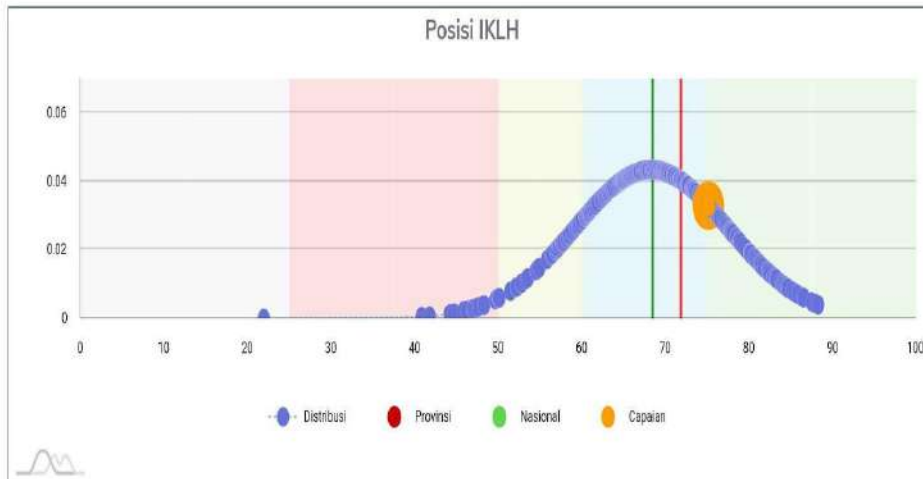
Pendapatan Per Kapita : Rp113,998,317.90

IKLH
75.08

BAIK
Indeks Respon
25.98

Perinakat

Nasional: 111 dari 514 Kabupaten/Kota
 Provinsi : 2 dari 10 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	12	16	15
AIR	23	30	30
LAUT	6	8	8
LAHAN	0	1	1
TOTAL	41	55	54

